



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERTANIAN

RENCANA STRATEGIS 2023-2026



SERIRIT



BULELENG



BANJAR



KUBUTAMBAHAN



BUSUNGBIU



SUKASADA



SAWAN



TEJAKULA



GEROKGAK



KABUPATEN BULELENG

DINAS PERTANIAN

KABUPATEN BULELENG

DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2022





BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

7.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

7

2. Bupati adalah Bupati Buleleng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
8. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
9. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas Kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

Pasal 3

- (1) Renstra disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- BAB VIII PENUTUP**

Pasal 4

- (1) Renstra disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi setelah Rencana Pembangunan Daerah ditetapkan.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- 1) Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
 - 2) Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 3) Rencana Strategis Inspektorat Daerah;
 - 4) Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - 5) Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
 - 6) Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - 7) Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - 8) Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran;
 - 9) Rencana Strategis Dinas Sosial;
 - 10) Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja;

- 11) Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 12) Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- 13) Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup;
- 14) Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 15) Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 16) Rencana Strategis Dinas Perhubungan;
- 17) Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- 18) Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 19) Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 20) Rencana Strategis Dinas Kebudayaan;
- 21) Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah;
- 22) Rencana Strategis Dinas Pariwisata;
- 23) Rencana Strategis Dinas Pertanian;
- 24) Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah;
- 25) Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
- 26) Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 27) Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 28) Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- 29) Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 30) Rencana Strategis Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- 31) Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 32) Rencana Strategis Kecamatan Gerokgak;
- 33) Rencana Strategis Kecamatan Seririt;
- 34) Rencana Strategis Kecamatan Busungbiu;
- 35) Rencana Strategis Kecamatan Banjar;

- 36) Rencana Strategis Kecamatan Sukasada;
- 37) Rencana Strategis Kecamatan Buleleng;
- 38) Rencana Strategis Kecamatan Sawan;
- 39) Rencana Strategis Kecamatan Kubutambahan; dan
- 40) Rencana Strategis Kecamatan Tejakula.

Pasal 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 25 Maret 2022



PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja

pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 12



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERTANIAN

Jl. Ahmad Yani No.99 Singaraja, Telp/Fax. (0362) 25090
e-mail: distan@bulelengkab.go.id, <https://distan.bulelengkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR: 188.4 / 691 / SKRT /Distan/2022

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023-2026**

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Buleleng telah ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2022, Tanggal 11 Maret 2022 tentang Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026;
- b. Bahwa untuk penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan di bidang pertanian perlu ditetapkan Rencana Strategis sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng dan Penetapan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali : (1, 10/2018))
15. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 050/3537/XII/Bappeda/2021, tanggal 8 Desember 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2023-2026

MEMUTUSKAN :

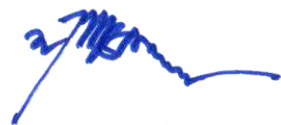
Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng yang dijadikan pedoman menyusun rencana kerja pembangunan di bidang pertanian untuk setiap tahunnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada Tanggal : 17 Maret 2022

Kepala Dinas,



Ir. I Made Sumiarta

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650215 199703 1 003

Tembusan kepada :

1. Bupati Buleleng,
2. Wakil Bupati Buleleng,
3. Inspektur Kabupaten Buleleng
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buleleng,
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng,
6. Arsip.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-----------|
| DAFTAR ISI | <i>i</i> |
| DAFTAR TABEL | <i>ii</i> |
| DAFTAR GAMBAR | <i>iv</i> |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan tujuan | 4 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG | 7 |
| 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi | 7 |
| 2.2 Sumber Daya | 29 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan | 38 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan | 42 |
| BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI | 43 |
| 3.1 Indentifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan | 43 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Buleleng | 44 |
| 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian | 46 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 48 |
| 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis | 53 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 54 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Buleleng | 54 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 57 |
| 5.1 Strategi | 57 |
| 5.2 Arah Kebijakan | 60 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 62 |
| 6.1 Pertanian | 63 |
| 6.2 Program/Kegiatan Rutin | 66 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG | 73 |
| BAB VIII PENUTUP | 75 |

DAFTAR TABEL

| | | Halaman |
|------------|--|---------|
| Tabel 2.1 | Potensi Lahan Kabupaten Buleleng | 30 |
| Tabel 2.2 | Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Buleleng | 30 |
| Tabel 2.3 | Perkembangan Produksi Buah-buahan Kabupaten Buleleng | 31 |
| Tabel 2.4 | Perkembangan Produksi Sayuran Kabupaten Buleleng | 32 |
| Tabel 2.5 | Perkembangan Produksi Perkebunan Kabupaten Buleleng | 32 |
| Tabel 2.6 | Populasi Ternak di Kabupaten Buleleng | 34 |
| Tabel 2.7 | Perkembangan Produksi Ternak di Kabupaten Buleleng | 34 |
| Tabel 2.8 | Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan | 36 |
| Tabel 2.9 | Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan | 36 |
| Tabel 2.10 | Alokasi Anggaran Dinas Pertanian dan Pternakan Kabupaten Buleleng Tahun 2018 s/d 2021 | 37 |
| Tabel 2.11 | Aset yang Dikelola dan Nilai Buku Dinas Pertanian dan Pternakan Kabupaten Buleleng Tahun 2017 s/d 2021 | 38 |
| Tabel 2.12 | Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pternakan Kabupaten Buleleng | 40 |
| Tabel 2.13 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Pternakan Kabupaten Buleleng | 41 |
| Tabel 3.1 | Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati Buleleng | 45 |
| Tabel 3.2 | Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian | 47 |
| Tabel 4.1 | Keterkaitan Antara Sasaran Dalam RPJMD Kabupaten Buleleng dengan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng | 55 |
| Tabel 4.2 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah | 56 |
| Tabel 5.1 | Matriks SWOT Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng | 59 |
| Tabel 5.2 | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng | 60 |

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 6.1 | Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng 2023-2026 | 69 |
| Tabel 7.1 | Indikator Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD | 74 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng | 7 |

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pertanian memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran ini digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan capital; penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, penyerap tenaga kerja; sumber pendapatan; serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan.

Pembangunan pertanian dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan mendasar sektor pertanian seperti meningkatnya jumlah penduduk; tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar; pesatnya kemajuan teknologi dan informasi; makin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi; perubahan iklim global; perkembangan dinamis sosial budaya masyarakat; kecilnya status dan luas kepemilikan lahan; masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan dan perbibitan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan; masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh; masih rawannya ketahanan pangan dan energi; masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian sehingga pembangunan pertanian ke depan menghadapi banyak tantangan.

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan, mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai setiap kegiatan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal, dan pemanfaatan sumber-sumber daya yang ada. Rencana strategis juga merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi operasional dan prioritas-prioritas.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 yang merupakan satu bagian yang utuh dari kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah serta ikut memenuhi tuntutan Visi, Misi dan Agenda pembangunan Bupati Buleleng sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Buleleng.

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), RPD (4 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Daerah dan dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana SKPD.

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng merupakan rencana dalam kurun waktu tahun 2023-2026 yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng serta berpedoman kepada RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Pemerintah Kabupaten Buleleng dan bersifat indikatif. Rencana Strategis akan menjadi tolok ukur penilaian pertanggung-jawaban Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng pada setiap akhir tahun anggaran.

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tahun 2023-2026 disusun berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal pemerintah, yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dari segala aspek. Secara garis besar Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng mencakup visi, misi kepala daerah serta strategi pencapaian visi maka ditetapkan program prioritas dengan kegiatan sesuai dengan kewenangan kabupaten, namun tetap diperlukan adanya dukungan semua pihak (pemerintah, swasta dan masyarakat).

Mengingat peran dan fungsi Rencana Strategis perangkat daerah sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat maka penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih teknis di Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tahun 2023-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2022, tanggal 11 Maret 2022 tentang Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana strategis Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tahun 2023–2026 dimaksudkan sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan Dinas Pertanian selama 4 (empat) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Daerah (Masa Transisi).

2. Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tahun 2023–2026 adalah:

- Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh Dinas Pertanian sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih (Masa Transisi);
- Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan (Masa Transisi);
- Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah (Masa Transisi) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dengan berpedoman kepada Perbup tentang RPD periode berkenaan.
- Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPD berkenaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tahun 2023–2026 disusun sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN** Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, Hubungan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dengan Dokumen Perencanaan lainnya dan sistematika penulisan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng.
- **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN** Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, dan kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dalam mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis periode sebelumnya, capaian program prioritas Dinas Pertanian yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPD periode sebelumnya, dan akan mengulas tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng.
- **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS** Bab ini memuat berbagai isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng seperti identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (masa transisi) dan telaahan Renstra K/L, serta penentuan isu-isu strategis.
- **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN** Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah strategi kurun waktu masa transisi 4 (empat) tahun ke depan.
- **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN** Bab ini diuraikan mengenai strategi dan arah kebijakan umum yang akan diambil dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).
- **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN** Dalam bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif yang diperlukan selama 4 (empat) tahun.
- **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN** Dalam Bab ini diuraikan indikator yang akan dicapai melalui sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023-2026 sesuai target capaian kinerja pada RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.
- **BAB VII PENUTUP** Pada bagian ini menjelaskan kembali mengenai kedudukan Rencana Strategis dalam proses pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,

serta kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buleleng, Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian

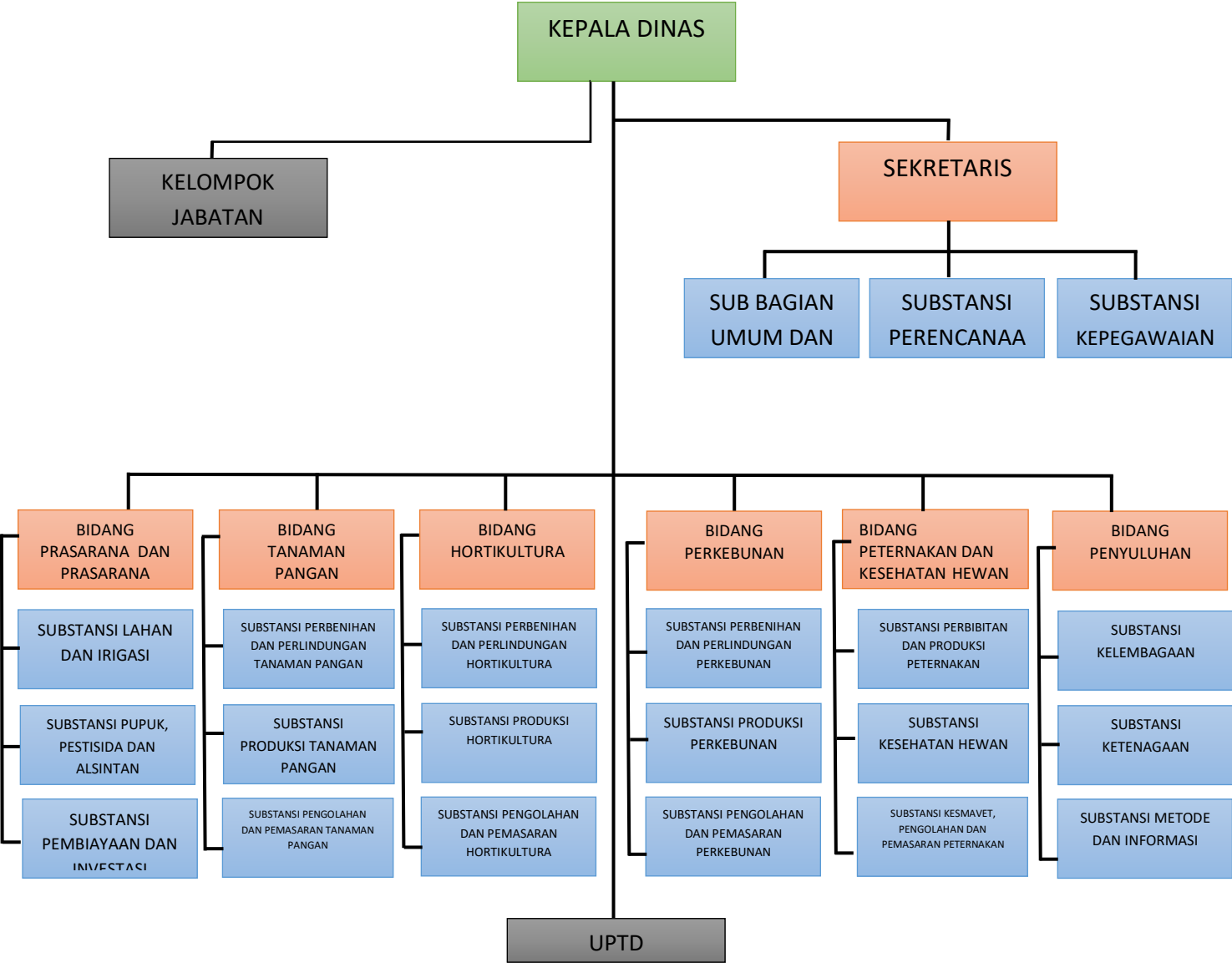
b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, menyelenggarakan fungsi :

- perumusan kebijakan di bidang Pertanian;
- pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanian;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanian;
- pelaksanaan administrasi dinas Pertanian;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng

d. Uraian Tugas :

Secara organisasi / struktural Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris
- 3. Bidang Prasarana dan Sarana
- 4. Bidang Tanaman Pangan
- 5. Bidang Hortikultura
- 6. Bidang Perkebunan
- 7. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 8. Bidang Penyuluhan Pertanian

Adapun uraian dari masing – masing kelompok tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS.

Kepala Dinas, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Pertanian, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. merumuskan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- e. merumuskan dan mengkoordinasikan penerbitan rekomendasi perijinan dibidang pertanian sesuai dengan kewenangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. merumuskan dan mengkoordinasikan pembukuan dan pelaporan retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. merumuskan, mengkoordinasikan, pelaksanaan pembinaan dan memonitoring pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pertanian dan UPT ;
- i. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah di lingkungan Dinas Pertanian;
- j. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian;
- k. merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Pertanian;
- l. merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Dinas Pertanian;
- m. mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal (SPIP) di lingkungan Dinas Pertanian;
- n. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Pertanian;
- o. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Pertanian;
- p. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;

- q. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekda; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. SEKRETARIS

Sekretaris, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian;
- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pertanian;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset dan pengelolaan barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Pertanian;
- h. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas Pertanian;
- i. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran Dinas dan UPT;
- j. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Pertanian;
- k. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian;
- l. mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pertanian;
- m. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Pertanian;
- n. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan sistem pengawasan internal (SPIP) di lingkungan Dinas Pertanian;
- o. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menerima, menyimpan, mengeluarkan dan membuat laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas;
- e. menyiapkan bahan, menyusun serta melaksanakan pencatatan pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan;
- f. melaksanakan pengurusan administrasi keuangan yang meliputi : penerbitan, meneliti kelengkapan dan menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- g. melaksanakan pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. melaporkan keadaan kas kepada atasan setiap bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan/keadaan;
- i. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Pertanian;
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.2. SUBSTANSI PERENCANAAN

Substansi Perencanaan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Kesekretariatan berdasarkan data serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memformulasikan sajian untuk analisis;
- c. menyusun rencana kerja (RENJA) dan Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Pertanian ;
- d. menyusun dokumen evaluasi kinerja Dinas Pertanian yang meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD DAN LKPJ;
- e. menyusun dokumen perencanaan pertanian yang meliputi : RKA/DPA, Rencana Umum Pengadaan (RUP), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kerja (PK), Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- f. melaksanakan dan menyusun laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);

- g. melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pertanian;
- h. melaksanakan pengelolaan data dan informasi Dinas Pertanian;
- i. melaporkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.3. SUBSTANSI SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR (Kepegawaian)

Substansi Sumber Daya Manusia Aparatur, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan kesekretariatan berdasarkan data serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memformulasikan sajian untuk analisis;
- c. melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur dengan menyiapkan bahan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian;
- d. merumuskan, menganalisis dan mengevaluasi data kepegawaian
- e. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian melalui konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi: penyusunan daftar urutan kepangkatan, formasi, *bezetting* pegawai, menyusun data pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pensiun;
- g. menyusun dan melaksanakan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Pariwisata;
- h. melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui analisis, evaluasi dan pengembangan;
- i. melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB);
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. BIDANG PRASARANA DAN SARANA

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana, berdasarkan data dan program Dinas Pertanian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan menyusun kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- e. memfasilitasi dan menyediakan dukungan infrastruktur pertanian;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;

- g. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan bimbingan pembiayaan pertanian;
- i. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan investasi pertanian;
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3.1. SUBSTANSI LAHAN DAN IRGASI

Substansi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Lahan dan Irigasi, berdasarkan data dan program Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
- f. melaksanakan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- i. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Lahan dan Irigasi;
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3.2. SUBSTANSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALAT MESIN PERTANIAN

Substansi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian berdasarkan data dan program Bidang Prasarana dan Sarana serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebijakan dibidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- e. melaksanakan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- f. melaksanakan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- g. melaksanakan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3.3. SUBSTANSI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI

Substansi Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Pembiayaan dan Investasi berdasarkan data dan program Bidang Prasarana dan Sarana serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;
- e. melaksanakan pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;
- f. melaksanakan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3 BIDANG TANAMAN PANGAN

Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Tanaman Pangan, berdasarkan data dan program Dinas Pertanian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;

- f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- g. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan alat mesin pengolahan dan penanganan pasca panen tanaman pangan;
- h. memfasilitasi dan menyiapkan pedoman dan pembinaan pengembangan teknologi produksi tanaman pangan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian;
- i. memfasilitasi pencapaian sasaran luas tanam dan produksi tanaman pangan;
- j. memfasilitasi dan menyiapkan pedoman dan pembinaan penerapan teknologi panen, pasca panen dan analisa usaha tani tanaman pangan;
- k. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- l. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- m. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- n. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
- o. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan;
- p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4.1 SUBSTANSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN

Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan, berdasarkan data dan program Bidang Tanaman Pangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan;

- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas di bidang tanaman pangan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamatan, pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan tanaman di bidang tanaman pangan;
- q. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4.2 SUBSTANSI PRODUKSI TANAMAN PANGAN

Substansi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Produksi Tanaman Pangan, berdasarkan data dan program Bidang Tanaman Pangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. melaksanakan koordinasi pencapaian luas areal tanam luas panen, produktivitas dan produksi di bidang tanaman pangan melalui pengaturan pola tanam;
- f. melaksanakan pembinaan dan penyusunan pedoman analisa usaha tani di bidang tanaman pangan;
- g. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan;

- h. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;
- i. menyiapkan pedoman teknis dan pembinaan pengembangan produksi tanaman pangan;
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4.3 SUBSTANSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN TANAMAN PANGAN

Substansi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan, berdasarkan data dan program Bidang Tanaman Pangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil tanaman pangan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- g. melaksanakan fasilitasi kebutuhan alat pasca panen dan pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan;
- i. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan;
- j. menyusun pedoman dan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- k. melaksanakan pengkajian dan pembinaan pemasyarakatan standarisasi mutu hasil di bidang tanaman pangan;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha serta promosi produk di bidang tanaman pangan;
- m. mengembangkan dan membina kerjasama dalam rangka pemasaran produk di bidang tanaman pangan;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- o. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5 BIDANG HORTIKULTURA

Kepala Bidang Hortikultura, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Hortikultura berdasarkan data dan program Dinas Pertanian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;
- g. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- i. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- j. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
- k. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura;
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5.1 SUBSTANSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN HORTIKULTURA

Substansi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura, berdasarkan data dan program Bidang Hortikultura serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan di bidang hortikultura;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang hortikultura;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang hortikultura;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang hortikultura;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang hortikultura;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang hortikultura;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian serangan OPT di bidang hortikultura;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamatan OPT di bidang hortikultura;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamatan, pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang hortikultura;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan kelembagaan OPT di bidang hortikultura;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang hortikultura;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan penanganan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan penanggulangan bencana alam di bidang hortikultura;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang hortikultura;
- r. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5.2 SUBSTANSI PRODUKSI HORTIKULTURA

Substansi Produksi Hortikultura, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Produksi Hortikultura, berdasarkan data dan program Bidang Hortikultura serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi hortikultura;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang hortikultura;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang hortikultura;

- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang hortikultura;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan Sekolah Lapang Good Agriculture Practices (SL GAP) di bidang hortikultura;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan penyiapan registrasi kebun hortikultura;
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5.3 SUBSTANSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HORTIKULTURA

Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura,, berdasarkan data dan program Bidang Hortikultura serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil hortikultura;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang Hortikultura;
- f. melaksanakan penyediaan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang hortikultura;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang hortikultura;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan Sekolah Lapang Good Handling Practices (SL GHP) di bidang hortikultura;
- i. melaksanakan bimbingan proses sertifikasi keamanan pangan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan informasi pasar di bidang hortikultura;
- k. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang hortikultura;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- n. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6 BIDANG PERKEBUNAN.

Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perkebunan, berdasarkan data dan program Dinas Pertanian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- g. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- i. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- k. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6.1 SUBSTANSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN.

Substansi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan, berdasarkan data dan program Bidang Perkebunan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan peredaran/penggunaan benih di bidang perkebunan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;

- g. melaksanakan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang perkebunan;
- h. merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang perkebunan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perkebunan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian OPT di bidang perkebunan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamatan OPT di bidang perkebunan;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang perkebunan;
- n. melaksanakan pengelolaan data OPT di bidang perkebunan;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan kelembagaan OPT di bidang perkebunan;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan;
- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- t. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6.2 SUBSTANSI PRODUKSI PERKEBUNAN

Substansi Produksi Perkebunan, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Produksi Perkebunan, berdasarkan data dan program Bidang Perkebunan serta peraturan perundang-undangan berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang produksi perkebunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan;

- f. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;
- g. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan sekolah lapang Good Agriculture Practices (SL-GAP) di bidang perkebunan;
- i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6.3 SUBSTANSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PERKEBUNAN

Substansi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan, berdasarkan data dan program Bidang Perkebunanserta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebijakan dibidang pengolahan hasil perkebunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang Perkebunan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang perkebunan;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan sekolah lapang Good Handling Practices (SL-GHP) di bidang perkebunan;
- i. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan;
- j. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7. BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, berdasarkan data dan program Dinas Pertanian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- g. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- i. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pengawasan obat hewan;
- j. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- k. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- l. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- m. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- n. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- o. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7.1.SUBSTANSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI PETERNAKAN

Substansi Perbibitan dan Produksi Peternakan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Perbibitan dan Produksi Peternakan, berdasarkan data dan program Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebijakan dibidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan Pakan ternak;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengujian benih/bibit HPT;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7.2 SUBSTANSI KESEHATAN HEWAN

Substansi Kesehatan Hewan, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Kesehatan Hewan, berdasarkan data dan program Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebijakan dibidang kesehatan hewan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat pengecer;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamatan, pencegahan, pemberantasan penyakit hewan dan penyakit zoonosis;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- h. melaksanakan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerbitan izin/rekomendasi usaha pengecer obat hewan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan pengawasan lalu lintas ternak/hewan;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa resiko pengeluaran dan atau pemasukan hewan;
- n. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan

- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7.3. SUBSTANSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PETERNAKAN.

Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Peternakan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Peternakan, berdasarkan data dan program Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang Peternakan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan bimbingan teknis pengeluaran dan atau pemasukan produk ternak;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis sertifikasi mutu usaha produk hewan skala kecil;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan bimbingan penanganan limbah, hygenis dan sanitasi usaha produk hewan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- l. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- m. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- o. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

8. BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN

Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penyuluhan, berdasarkan data dan program Dinas Pertanian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan pertanian;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
- f. memfasilitasi, mengolah, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- i. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi peningkatan kapasitas penyuluh pertanian;
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

8.1. SUBSTANSI KELEMBAGAAN

Substansi Kelembagaan, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Kelembagaan, berdasarkan data dan program Bidang Penyuluhan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang Kelembagaan penyuluhan pertanian;
- f. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas Kelembagaan petani;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
- h. melaksanakan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;

- i. melaksanakan pembinaan kelembagaan kontak tani nelayan andalan secara berkesinambungan dan mandiri;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
- k. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
- l. merencanakan, melaksanakan pembinaan, dan mengevaluasi kelembagaan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA);
- m. memfasilitasi kegiatan Pekan Daerah (PEDA)/Pekan Nasional (PENAS) KTNA;
- n. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

8.2.SUBSTANSI KETENAGAAN

Substansi Ketenagaan,mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Ketenagaan, berdasarkan data dan program Bidang Penyuluhan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluhan pertanian;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan ketenagaan penyuluhan pertanian;
- i. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

8.3.SUBSTANSI METODE DAN INFORMASI

Substansi Metode dan Informasi, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Metode dan Informasi, berdasarkan data dan program Bidang Penyuluhan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan informasi dan media penyuluhan pertanian untuk penerapan teknologi pertanian tepat guna sesuai spesifik lokasi;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian;
- j. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian;
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.2. Sumber Daya

1. Kondisi dan Potensi Pertanian Kabupaten Buleleng

Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Buleleng. Produk pertanian paling utama yaitu padi sawah dengan jumlah produksi pada tahun 2021 sebanyak 106.660,5 ton dengan luas panen seluas 19.014,07 Ha. Semakin langkanya lahan pertanian menyebabkan terjadinya persaingan penggunaan lahan, sehingga mendorong pemanfaatan sumberdaya lahan secara optimal, terarah dan berkelanjutan dengan memperhatikan berbagai kebutuhan. Upaya peningkatan produktivitas padi dengan mengoptimalkan sumberdaya lahan yang masih tersisa dapat dilakukan dengan lebih efisien bila dilaksanakan pada lahan-lahan yang sesuai atau lahan dengan kondisi fisik yang sangat mendukung dan juga dengan penggunaan teknologi tepat guna.

Penggunaan lahan di Kabupaten Buleleng ditunjukkan oleh Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Potensi Lahan Kabupaten Buleleng

| JENIS LAHAN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| LAHAN SAWAH | 10.335 | 9.497 | 8.964 | 9.042.2 | 9.026 |
| LAHAN PERTANIAN BUKAN SAWAH | | | | | |
| -Tegal/ Kebun | 36.990 | 37.028 | 37.056 | 36.991 | 37.069 |
| -Perkebunan | 31.323 | 31.463 | 32.267 | 32.382,7 | 31.983 |

Sumber : Buku Statistik Pertanian

Alih fungsi lahan sawah cukup tinggi. Alih fungsi pada tahun 2021 untuk lahan sawah sebesar 129 ha, berkurangnya areal sawah karena adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian, selain itu terjadi alih fungsi lahan sawah ke lahan perkebunan.

Komoditi palawija juga dikembangkan di Kabupaten Buleleng. Dalam sistem yang menekankan pertanian berkelanjutan, palawija merupakan salah satu komponen untuk melakukan rotasi tanaman. Palawija mampu menghemat air di musim kering sehingga tidak memberikan beban bagi irigasi, terutama ketika irigasi tidak mampu memberikan cukup air bagi padi sawah. Palawija juga mampu menjadi sumber penghidupan di lahan kering dan dataran tinggi di mana padi tidak dapat tumbuh. Perkembangan produksi tanaman pangan ditunjukkan oleh Tabel 2.2

Tabel 2.2
Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Buleleng

| Jenis Tanaman | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) |
| Padi | | | | | | | | |
| • Padi Sawah | 21.318 | 131.113 | 20.739 | 122.169 | 17.893 | 99.459 | 15.973.7 | 90.542.5 |
| Palawija | | | | | | | | |
| • Jagung | 5.875 | 23.714 | 5.813 | 19.144 | 5.335 | 22.353 | 6.649 | 31.748 |
| • Kedelai | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| • Kacang Hijau | 159 | 100 | 150 | 95 | 93 | 57 | 67 | 40.2 |
| • Kacang | 870 | 1.332 | 1.145 | 1.754 | 1.423 | 1.834 | 1.089 | 1.403 |
| Tanah | | | | | | | | |
| • Ubi Kayu | 288 | 3.603 | 234 | 2.837 | 400 | 4.945 | 586 | 7.243 |
| • Ubi Jalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |

Sumber : Buku Profil Pertanian

Komoditi hortikultura yang potensial dan banyak dikembangkan adalah komoditas tanaman buah-buahan yang dihasilkan di Kabupaten Buleleng antara lain anggur, durian, jeruk, mangga, manggis, pisang, rambutan serta jenis buah lainnya. Mangga (jenis Arumanis dan Lalijiwa/Madu) dan rambutan banyak ditanam di

Kecamatan Tejakula, Kubutambahan, Sawan dan Gerokgak. Pisang banyak ditanam hampir di semua kecamatan. Durian, Wani dan Manggis di Kecamatan Sawan, Banjar dan Busungbiu. Anggur banyak ditanam di Kecamatan Banjar, Seririt dan Gerokgak.

Pembibitan tanaman buah-buahan di Desa Suwug, Sinabun dan Sudaji Kecamatan Sawan; Desa Bila Kecamatan Kubutambahan; dan Desa Les Kecamatan Tejakula. Selain jenis Mangga dan Wani yang sudah cukup dikenal, Kabupaten Buleleng juga memiliki beberapa jenis Mangga lokal meskipun dengan populasi sangat terbatas, namun potensial untuk dikembangkan antara lain mangga/poh Bikul di Desa Menyali, Mangga Amplemsari di Desa Tejakula, dan wani Ngumpen di Desa Bebetin. Perkembangan produksi buah-buahan ditunjukkan oleh Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Perkembangan Produksi Buah-Buahan Kabupaten Buleleng

| Jenis Komoditi | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | |
|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| | Jumlah Tanaman (pohon) | Produksi (ton) | Jumlah Tanaman (pohon) | Produksi (ton) | Jumlah Tanaman (pohon) | Produksi (ton) | Jumlah Tanaman (pohon) | Produksi (ton) |
| Mangga | 667.560 | 32.706 | 681.346 | 33.257 | 680.541 | 26.260 | 680.676 | 33.990 |
| Rambutan | 256.828 | 10.724 | 260.344 | 15.845 | 250.925 | 10.991 | 250.895 | 19.425 |
| Anggur | 333.940 | 10.298 | 383.246 | 13.065 | 434.464 | 12.456 | 434.464 | 10.154 |
| Pisang | 911.289 | 40.346 | 966.467 | 26.754 | 970.378 | 25.632 | 969.833 | 21.404 |
| Manggis | 70.711 | 3.123 | 71.061 | 1.881 | 73.941 | 1.886 | 73.971 | 2.217 |
| Durian | 123.077 | 6.271 | 107.827 | 4.729 | 122.930 | 3.101 | 125.492 | 3.921 |
| Jeruk | 403.527 | 8.090 | 384.546 | 11.373 | 382.936 | 3.532 | 384.013 | 5.519 |

Sumber : Buku Profil Pertanian

Komoditi hortikultura lainnya adalah tanaman sayur-sayuran antara lain adalah bawang merah, bawang putih, bawang daun, kentang, kubis, sawi, wortel, kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, tomat, terong, buncis dan paprica. Banyaknya jenis tanaman sayuran yang dihasilkan berkaitan dengan kondisi alam Kabupaten Buleleng yang berbukit-bukit sehingga Buleleng dikenal sebagai salah satu daerah penghasil sayur-sayuran di Bali. Komoditi sayur-sayuran dataran tinggi di Kecamatan Sukasada dan sayuran dataran rendah di Kecamatan Kubutambahan, Sawan dan Seririt. Tanaman hias banyak dikembangkan di Kecamatan Sukasada dan Banjar. Tanaman Biofarmaka banyak dikembangkan Kecamatan Seririt, Busungbiu dan Banjar. Perkembangan produksi sayuran ditunjukkan oleh Tabel 2.4

Tabel 2.4
Perkembangan Produksi Sayuran Kabupaten Buleleng

| Jenis Komoditi | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Luas Tanam (Ha) | Produksi (ton) | Luas Tanam (Ha) | Produksi (ton) | Luas Tanam (Ha) | Produksi (ton) | Luas Tanam (Ha) | Produksi (ton) |
| Bawang Merah | 45 | 478 | 33 | 410 | 25 | 317 | 41 | 526 |
| Bawang Putih | 13 | 108 | 47 | 414 | 14 | 90 | 59 | 579 |
| Kentang | 10 | 111 | 7 | 890 | 21 | 269 | 4 | 40 |
| Kubis | 50 | 563 | 39 | 698 | 48 | 1.314 | 301 | 4.837 |
| Petsai/Sawi | 14 | 174 | 11 | 216 | 24 | 202 | 217 | 2.021 |
| Wortel | 55 | 1.083 | 43 | 725 | 53 | 416 | 41 | 257 |
| Kacang Panjang | - | - | - | - | 4 | 20 | 0.3 | 1 |
| Cabai | 960 | 5.092 | 1.512 | 14.515 | 1.215 | 16.635 | 1.035 | 12.104 |
| Tomat | 19 | 785 | 6 | 168 | 15 | 718 | 18 | 350 |

Sumber : Buku Profil Pertanian

Kendala utama yang dihadapi petani hortikultura di Kabupaten Buleleng adalah belum adanya kepastian pasar dan harga sangat berfluktuasi. Umumnya harga buah-buahan seperti mangga, rambutan dan anggur sangat rendah ketika musim panen raya sehingga sangat merugikan petani.

Kabupaten Buleleng memiliki wilayah pengembangan tanaman perkebunan rakyat (monokultur) yang cukup luas, Adapun jumlah produksi komoditas perkebunan tahun 2021 mencapai 22.801 Ton. Komoditas yang diusahakan cukup beragam sesuai daerah adaptasi masing-masing jenis tanaman yaitu kopi Robusta, cengkeh, vanili dan kakao di dataran sedang; kopi arabika di dataran tinggi dan kelapa dalam, tembakau Virginia serta jambu mete di dataran rendah. Perkembangan produksi perkebunan ditunjukkan oleh Tabel 2.5

Tabel 2.5
Perkembangan Produksi Perkebunan Kabupaten Buleleng

| Jenis Komoditi | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Luas Areal (Ha) | Produksi (ton) | Luas Areal (Ha) | Produksi (ton) | Luas Areal (Ha) | Produksi (ton) | Luas Areal (Ha) | Produksi (ton) |
| Kopi Robusta | 9.681,48 | 7.325,78 | 9.681,48 | 5.242,45 | 9.681,48 | 7.325,78 | 9.743,48 | 5.379,38 |
| Kopi Arabika | 2.176 | 1.236,76 | 2.176 | 1.230 | 2.176 | 1.231,83 | 1.938,45 | 1.114,49 |
| Kakao | 1.168,83 | 618,03 | 1.179,83 | 703,57 | 1.179,83 | 749,66 | 1.069,33 | 547,36 |
| Cengkeh | 7.492,37 | 2.332,91 | 7.625,37 | 2.182,90 | 7.793,57 | 3.184,57 | 7.763,82 | 2.288,19 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kapok | 234 | 90,15 | 234 | 35,47 | 234 | 52,67 | 234 | 35,57 |
| Tembakau Virginia | 279,55 | 714,85 | 288,90 | 739,49 | - | - | - | - |
| Tembakau Rajangan | 60 | 72 | 60 | 75 | 42 | 58,80 | 50 | 70 |
| Kelapa Dalam | 8.434,84 | 9.526,02 | 8.434,84 | 9.521,43 | 8.434,84 | 9.708,09 | 8.339,54 | 9.482,89 |
| Kelapa Genjah | 153,38 | 90,11 | 168,78 | 111,830 | 183,03 | 102,480 | 188,03 | 97,41 |
| Jambu Mete | 1.571,25 | 473,73 | 1.603,25 | 489,15 | 1.603,25 | 283,80 | 1.444,25 | 494,61 |
| Aren/ enau | 93,00 | 40,24 | 93,00 | 29,67 | 93 | 26,19 | 93 | 30,17 |

Sumber : Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng

Jika dibandingkan dengan tanaman hortikultura, pasar komoditi perkebunan relative lebih terbuka dan memiliki harga yang relatif stabil. Khusus untuk kopi arabika, petani kopi Kabupaten Buleleng sudah mampu menghasilkan biji kopi organik dan mendapatkan sertifikat rainforest. Kendala utama dalam pengembangan budidaya tanaman perkebunan adalah produksi tidak menentu akibat anomali iklim.

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu daerah produksi pertanian sehingga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah penghasil ternak yang merupakan sumber pertumbuhan baru ekonomi rakyat dengan memanfaatkan limbah pertanian sebagai pakan ternak. Pembangunan bidang peternakan merupakan salah satu bagian dasar yang penting bagi pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kemampuan petani peternak untuk menuju kemandirian sehingga tingkat pendapatan dan kesejahteraannya semakin meningkat.

Pengendalian penyakit menular dan berkembangnya teknologi peternakan khususnya pelayanan inseminasi buatan sapi memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan peternak. Mengingat Kabupaten Buleleng dengan kondisi geografis dan kultur sosial ekonomi serta sumber daya yang dimiliki sangat mendukung kelangsungan usaha peternakan.

Potensi ternak yang ada dan sudah berkembang selama ini adalah ternak besar yaitu sapi, babi, kambing dan kerbau serta ternak unggas yaitu ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging dan itik. Populasi Ternak di Kabupaten Buleleng ditunjukkan oleh Tabel 2.6 dan Perkembangan produksi ternak di Kabupaten Buleleng ditunjukkan oleh Tabel 2.7

Tabel 2.6
Populasi Ternak di Kabupaten Buleleng

| JENIS TERNAK | Banyaknya Populasi (ekor) | | | |
|-------------------|---------------------------|---------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Sapi Potong | 133.331 | 148.280 | 148.644 | 153.103 |
| Kerbau | 132 | 122 | 123 | 89 |
| Kuda | 19 | 10 | 5 | 4 |
| Babi Bali | 112.957 | 86.519 | 45.051 | 45.505 |
| Babi Sadleback | 53.785 | 66.246 | 40.265 | 41.256 |
| Babi Landrace | 29.185 | 31.977 | 19.814 | 20.165 |
| Kambing Kacang | 6.744 | 3.827 | 3.829 | 4.040 |
| Kambing PE | 22.044 | 19.496 | 19.010 | 19.500 |
| Ayam Buras | 758.546 | 722.813 | 727.019 | 780.716 |
| Ayam Ras Petelur | 55.110 | 50.705 | 69.447 | 76.880 |
| Ayam Ras Pedaging | 388.924 | 371.170 | 408.978 | 416.150 |

Sumber : Data Cacah Jiwa Ternak

Tabel 2.7
Perkembangan Produksi Daging di Kabupaten Buleleng

| JENIS PRODUKSI DAGING | Jumlah produksi (ton) | | | |
|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Daging Sapi | 2.928 | 3.137 | 3.866 | 4.235 |
| Daging Kerbau | - | 5 | 3 | 5 |
| Daging Babi | 5.300 | 5.427 | 1.667 | 1.228 |
| Daging Kambing | 642 | 532 | 796 | 395 |
| Daging Ayam Buras | 323 | 357 | 1.008 | 1.027 |
| Daging Ayam Ras | 528 | 366 | 851 | 819 |
| Daging Itik | - | 20 | 78 | 32 |
| TOTAL PRODUKSI DAGING | 9.723 | 9.845 | 8.269 | 7.741 |
| | | | | |
| Telur Ayam Buras | 22.529 | 2.020 | 1.446 | 2.106 |
| Telur Ayam ras | 871 | 756 | 328 | 1.264 |
| Telur Itik | - | 1.016 | 279 | 932 |
| TOTAL PRODUKSI TELOR | 733 | 3.792 | 2.053 | 4.302 |

Sumber : Data Cacah Jiwa Ternak

Peningkatan produksi hasil peternakan dilaksanakan dalam rangka penambahan populasi dan peningkatan mutu genetik ternak sapi potong untuk menjadikan Kabupaten Buleleng sebagai sentra ternak sapi potong nasional. Upaya percepatan pengembangan peternakan di Kabupaten Buleleng tersebut dilakukan di Kecamatan Gerokgak.

Pembangunan peternakan di Kabupaten Buleleng pada dasarnya merupakan bidang yang potensial yang memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan

ekonomi di sektor pertanian, khususnya dalam upaya perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak dan keluarga petani peternak guna pengentasan kemiskinan serta peningkatan konsumsi protein hewani dalam rangka peningkatan kecerdasan bangsa.

Sampai dengan tahun 2021 ini infrastruktur pertanian yang dibangun adalah Balai Benih Terintegrasi di Gerokgak dimana Balai Benih Hortikultura pindah lokasi ke Balai Benih Terintegrasi dengan fasilitas kantor, screen house dan perlengkapan lainnya. Pada Balai tersebut juga dibangun Intalasi Bibit dan Hijauan Pakan Ternak dengan bangunan kandang koloni, rumah pakan dan perlengkapan penunjang peternakan. Balai benih terintegrasi juga terdapat balai benih tanaman pangan dengan kantor dan lantai jemur. Infrastruktur lainnya seperti gedung BPP dan Puskesmas di 9 kecamatan, Rumah Potong Hewan (RPH) Panji Anom dan Balai Benih Utama Tanaman Pangan Tangguwisia.

Kelembagaan pertanian yang ada sampai saat ini adalah Subak Sawah 306 kelompok, Subak Abian 209 kelompok, untuk jumlah Kelompok Tani Ternak 1903 kelompok yang terdiri dari pemula 611 kelompok, lanjut 678 kelompok, madya 427 kelompok, dan utama 187 kelompok. Sedangkan Kelompok Wanita Tani (KWT) 283 kelompok terdiri dari pemula 176 kelompok, lanjut 87 kelompok, madya 18 kelompok dan utama 2 kelompok, untuk jumlah Gapoktan di Kabupaten Buleleng sebesar 155 kelompok.

2. Sumber Daya Manusia

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan keuangan sampai

Bulan Desember Tahun 2021 berjumlah 312 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada Tabel 2.8 Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng berdasarkan data dari Sub Bagian Umum sampai Bulan Desember Tahun 2021 berjumlah 168 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada Tabel 2.8

Tabel 2.8
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

| No | Uraian | Eselon II | Eselon III | Eselon IV | JF-Substansi | Staf/Fungsional | Jumlah |
|----|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------------|------------|
| 1. | Kepala Dinas | 1 | | | | | 1 |
| 2. | Sekretariat | | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 |
| 3. | Bidang Tanaman Pangan | | 1 | | 3 | 4 | 8 |
| 4. | Bidang Hortikultura | | 1 | | 3 | 2 | 6 |
| 5. | Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | | 1 | | 3 | 4 | 8 |
| 6. | Bidang Perkebunan | | 1 | | 3 | 4 | 8 |
| 7. | Bidang Penyuluhan | | 1 | | 3 | 1 | 5 |
| 8. | Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian | | 1 | | 3 | 2 | 6 |
| 9. | Fungsional | | | | | 110 | 110 |
| | JUMLAH | 1 | 7 | 1 | 20 | 139 | 168 |

Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng

Tabel 2.9

Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

| No | Uraian | S2 | S1 | D3 | SMA | SMP | SD | Jumlah |
|----|---------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|----|------------|
| 1. | Kepala Dinas | | 1 | | | | | 1 |
| 2. | Sekretariat | 1 | 6 | | 7 | | | 14 |
| 3. | Bidang Tanaman Pangan | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | | 10 |
| 4. | Bidang Hortikultura | 1 | 4 | | 1 | | | 6 |
| 5. | Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 5 | 2 | | 1 | | | 8 |
| 6. | Bidang Perkebunan | 2 | 4 | | 2 | | | 8 |
| 7. | Bidang Penyuluhan | 2 | 3 | | | | | 5 |
| 8. | Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian | | 5 | | 1 | | | 6 |
| 9. | Fungsional | 5 | 78 | 3 | 24 | | | 110 |
| | JUMLAH | 18 | 108 | 4 | 37 | 1 | | 168 |

Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.9, tingkat pendidikan

karyawan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng yang paling banyak adalah pendidikan S1 sebanyak 108 orang (64,28 %). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng secara umum.

Jumlah karyawan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng yang menamatkan pendidikan S2 tercatat ada 18 orang, S1 tercatat sebanyak 108 orang, yang secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 64,28 % dari seluruh karyawan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, hal ini tentu menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng.

Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng adalah mengenai terus berkurangnya jumlah pegawai karena memasuki masa pensiun, dimana tidak diikuti dengan bertambahnya pegawai baru untuk menggantikan posisi bersangkutan.

3. Anggaran

Dari sisi anggaran, Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng yang sebelumnya adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng mendapatkan alokasi anggaran yang memadai, alokasi anggaran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 ditunjukkan oleh Tabel 2.10

Tabel 2.10
Alokasi Anggaran Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Buleleng Tahun 2018 s/d Tahun 2021

| No | Tahun Anggaran | Jumlah Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|----|----------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 1. | 2018 | 18.695.014.677,35 | 16.107.295.242 | 86,16 |
| 2. | 2019 | 20.668.840.167,67 | 19.959.082.108,10 | 96,57 |
| 3. | 2020 | 16.870.504.730,39 | 16.783.944.008 | 98,82 |
| 4. | 2021 | 30.340.772.889 | 28.728.862.603 | 94,69 |

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng

Peningkatan alokasi anggaran berbanding lurus dengan serapan anggarannya, penyerapan anggaran rata-rata diatas 90% dalam penyerapannya. Adapun permasalahan yang ada seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

4. Aset, Prasarana dan Sarana

Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menempati kantor yang berdiri diatas lahan seluas 3.650 meter persegi milik Pemerintah Kabupaten Buleleng yang beralamat

di Jl. Ahmad Yani No 99 Singaraja. Selain itu terdapat pula Balai Penyuluhan Pertanian yang tersebar di 9 kecamatan, 9 unit Puskesmas, 2 unit Rumah Potong Hewan, dan 1 unit Balai Benih Terintegrasi, 1 unit Balai Benih Utama Padi. Secara umum aset yang dikelola dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada Tabel 2.11 berikut :

Tabel 2.11
Aset yang Dikelola dan Nilai Buku Dinas Pertanian
Kabupaten Buleleng Tahun 2017 s/d Tahun 2021

| No | Sub Kelompok Aset | Jumlah | Total Nilai Buku 2016 (Rp.) | Ket |
|----|--|-------------------|-----------------------------|-----|
| 1. | Tanah | 7 bidang | 6.612.540.000 | |
| 2. | Peralatan dan Mesin | 4.128 unit | 13.153.251.488 | |
| | -Alat-alat besar | 9 unit | 1.010.287.000 | |
| | -Alat angkutan | 226 unit | 4.010.182.800 | |
| | -Alat bengkel dan alat ukur | 68 unit | 196.044.000 | |
| | -Alat pertanian | 269 unit | 912.025.750 | |
| | -Alat kantor dan rumah tangga | 2.500 unit | 4.921.621.708 | |
| | -Alat studio dan komunikasi | 135 unit | 1.213.798.710 | |
| | -Alat-alat kedokteran | 477 unit | 147.838.180 | |
| | -Alat laboratorium | 444 unit | 741.453.340 | |
| 3 | Gedung dan bangunan | 134 unit | 18.802.605.291,82 | |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 26 unit | 2.488.980.950 | |
| | -Jalan dan jembatan | 4 unit | 693.000.000 | |
| | -Bangunan air/Irigasi | 7 unit | 832.893.000 | |
| | -Instalasi | 7 unit | 200.929.100 | |
| | -Jaringan | 8 unit | 762.158.850 | |
| 5 | Aset tetap lainnya | 2.130 unit | 342.915.000 | |
| | -Hewan ternak, tanaman, serta bangunan renovasi APBD | 2.130 unit | 342.915.000 | |
| | JUMLAH : | | 39.318.937.979,82 | |

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng

Lokasi Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, lokasi yang terpisah dari kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Buleleng di Jl. Pahlawan memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus.

Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, printer dan lain-lain) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai.

Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset adalah banyaknya barang yang sudah rusak tetapi belum dilakukan penghapusan, serta tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng.

2.3. Kinerja Pelayanan

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, utamanya berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu Pertanian ditunjukkan oleh Tabel 2.12 sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng ditunjukkan oleh Tabel 2.13 berikut ini:

Tabel 2.12
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng

| No | Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD | Target IKK | Data Awal | Target Renstra SKPD Tahun Ke- | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | Rasio Capaian Tahun Ke- | | | |
|----|--|------------|-----------|-------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------|---------|---------|----------|-------------------------|----------|---------|---------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Peningkatan produktivitas padi rata-rata 0,25% per Tahun (kw/ha) | 57.11 | 55.43 | 56.68 | 56.82 | 56.97 | 57.11 | 62.56 | 58.94 | 58.32 | 56.10 | 5.88 | 2.12 | 1 | (1) |
| 2 | Peningkatan produksi palawija rata-rata 2% per tahun (ton) | 46,040 | 51,966 | 43,385 | 44,252 | 45,137 | 46,040 | 47,610 | 33,210 | 41,194 | 37,033.3 | 4,225 | (11,042) | (3,943) | (9,007) |
| 3 | Peningkatan produksi Hortikultura 5% per tahun (ton) | 134,869 | 121,355 | 124,389 | 127,499 | 130,941 | 134,869 | 175,557 | 127,593 | 137,839 | 137,855 | 51,168 | 94 | 6,898 | 2,986 |
| 5 | Meningkatnya populasi ternak (ekor) : | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Sapi potong 5% per tahun | 142,000 | 7,874 | 123,421 | 140,252 | 141,000 | 142,000 | 133,331 | 148,280 | 148,644 | 153,103 | 9,910 | 8,028 | 7,644 | 11,103 |
| | - Ayam buras 5% per tahun | 702,000 | 690,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 702,000 | 758,546 | 722,813 | 727,019 | 780,716 | 58,546 | 22,813 | 27,019 | 78,716 |
| | - Babi 3% per tahun | 45,505 | 35,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 45,505 | 112,957 | 86,519 | 45,051 | 45,409 | 72,957 | 46,519 | 5,051 | (96) |
| | - Kambing 1% pertahun | 21,000 | 19,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 21,000 | 28,788 | 23,323 | 22,839 | 23,540 | 8,788 | 3,323 | 2,839 | 2,540 |
| | - Ayam ras 1% per tahun | 60,000 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 55,110 | 50,705 | 69,447 | 76,880 | 5,110 | 705 | 9,447 | 16,880 |
| 6 | Meningkatnya produksi daging 2% per tahun (ton) | 7,500 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 7,500 | 9,723 | 9,845 | 8,269 | 7,741 | 2,723 | 2,845 | 769 | 241 |
| 7 | Meningkatnya produksi telur 3% per tahun (ton) | 3,000 | 580 | 600 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 733 | 3,792 | 2,053 | 4,302 | 133 | 1,792 | 53 | 1,302 |

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng

| Kode | Uraian | Anggaran pada Tahun ke-(x1000) | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke-(x1000) | | | | Ratio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-(x1000) | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|------|--|--------------------------------|---------------|---------------|------|--|---------------|---------------|------|---|------------|------------|------|-----------------------|---------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1,934,190,000 | 2,150,372,700 | 1,499,407,971 | - | 1,691,902,196 | 2,051,783,929 | 1,454,307,998 | - | 242,287,804 | 98,588,771 | 45,099,973 | - | 4,584,365,357 | 4,228,455,458 |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 62,740,000 | 68,800,000 | 72,765,000 | | 61,253,394 | 67,871,093 | 72,665,000 | | 1,486,606 | 928,907 | 100,000 | | 155,795,000 | 153,346,154 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 300,000,000 | 260,194,900 | 243,416,228 | | 213,877,851 | 210,593,632 | 206,283,044 | | 86,122,149 | 49,601,268 | 37,133,184 | | 641,333,643 | 493,232,498 |
| 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 199,200,000 | 222,000,000 | 200,235,100 | | 180,891,250 | 221,873,000 | 200,134,900 | | 18,308,750 | 127,000 | 100,200 | | 487,945,033 | 469,475,883 |
| 4 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | 7,000,000 | 7,400,000 | 7,400,000 | | 3,787,900 | 3,994,300 | 4,696,300 | | 3,212,100 | 3,405,700 | 2,703,700 | | 16,866,667 | 9,347,633 |
| 5 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 334,000,000 | 406,712,000 | 160,300,000 | | 309,558,900 | 387,886,247 | 159,847,920 | | 24,441,100 | 18,825,753 | 452,080 | | 794,145,333 | 750,727,787 |
| 6 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 156,500,000 | 188,543,000 | 175,418,700 | | 142,973,470 | 188,176,980 | 175,109,900 | | 13,526,530 | 366,020 | 308,800 | | 403,515,900 | 389,520,417 |
| 7 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 35,000,000 | 21,400,000 | 24,800,000 | | 12,111,000 | 18,270,000 | 23,488,000 | | 22,889,000 | 3,130,000 | 1,312,000 | | 64,666,667 | 38,210,333 |
| 8 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 65,000,000 | 65,000,000 | 57,052,200 | | 45,035,170 | 58,785,441 | 56,207,580 | | 19,964,830 | 6,214,559 | 844,620 | | 149,017,400 | 122,556,471 |
| 9 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 26,000,000 | 24,908,000 | 35,232,000 | | 22,440,220 | 24,860,000 | 35,046,000 | | 3,559,780 | 48,000 | 186,000 | | 62,652,000 | 58,982,220 |
| 10 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 166,750,000 | 217,840,000 | 175,795,039 | | 163,999,400 | 216,441,500 | 174,477,600 | | 2,750,600 | 1,398,500 | 1,317,439 | | 443,188,346 | 438,600,100 |
| 11 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 11,000,000 | 11,000,000 | 2,500,000 | | 7,450,000 | 7,347,000 | 2,408,000 | | 3,550,000 | 3,653,000 | 92,000 | | 22,833,333 | 15,599,667 |
| 12 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 60,000,000 | 93,760,000 | 44,100,000 | | 43,531,450 | 92,553,300 | 44,078,500 | | 16,468,550 | 1,206,700 | 21,500 | | 168,460,000 | 150,777,583 |
| 13 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah | 325,000,000 | 338,143,700 | 115,884,254 | | 302,249,091 | 334,351,392 | 115,864,254 | | 22,750,909 | 3,792,308 | 20,000 | | 701,771,784 | 675,221,901 |
| 14 | Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian | 186,000,000 | 224,671,100 | 184,509,450 | | 182,743,100 | 218,780,044 | 184,001,000 | | 3,256,900 | 5,891,056 | 508,450 | | 472,174,250 | 462,856,811 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|---|-------------|------------|-----------|---|---------------|---------------|
| 02 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 861,250,000 | 952,848,000 | 502,895,849 | - | 749,677,500 | 916,583,655 | 498,605,680 | - | 111,572,500 | 36,264,345 | 4,290,169 | - | 1,863,863,283 | 1,840,658,882 |
| 1. | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 260,000,000 | 252,400,000 | | | 240,780,000 | 252,300,000 | | | 19,220,000 | 100,000 | - | | 386,200,000 | 493,080,000 |
| 2. | Pengadaan Mebeleur | 39,000,000 | 28,860,000 | 21,000,000 | | 30,580,000 | 28,847,500 | 20,790,000 | | 8,420,000 | 12,500 | 210,000 | | 74,860,000 | 66,357,500 |
| 3. | Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara | 150,000,000 | 204,940,000 | 52,300,000 | | 138,714,400 | 200,735,700 | 52,267,000 | | 11,285,600 | 4,204,300 | 33,000 | | 372,373,333 | 356,872,433 |
| 4. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 100,000,000 | 20,000,000 | 149,118,657 | | 99,910,000 | 19,899,000 | 148,630,350 | | 90,000 | 101,000 | 488,307 | | 169,706,219 | 169,352,450 |
| 5. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 167,250,000 | 190,672,000 | 157,528,192 | | 98,756,000 | 167,321,076 | 156,664,880 | | 68,494,000 | 23,350,924 | 863,312 | | 410,431,397 | 318,298,703 |
| 6. | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah | 145,000,000 | 153,976,000 | 72,949,000 | | 140,937,100 | 146,232,229 | 71,078,450 | | 4,062,900 | 7,743,771 | 1,870,550 | | 323,292,333 | 310,862,146 |
| 7. | Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor | | 52,000,000 | 50,000,000 | | | 51,810,000 | 49,175,000 | | | 190,000 | 825,000 | | 77,000,000 | 76,397,500 |
| 8. | Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah | | 50,000,000 | | | | 49,438,150 | | | | 561,850 | - | | 50,000,000 | 49,438,150 |
| 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 135,760,000 | 109,348,000 | - | - | 113,235,400 | 109,098,000 | - | - | 22,524,600 | 250,000 | - | - | 190,434,000 | 167,784,400 |
| 1. | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | 95,760,000 | 84,348,000 | | | 94,835,400 | 84,348,000 | | | 924,600 | - | - | | 137,934,000 | 137,009,400 |
| 2. | Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur | 40,000,000 | 25,000,000 | | | 18,400,000 | 24,750,000 | | | 21,600,000 | 250,000 | - | | 52,500,000 | 30,775,000 |
| 04 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100,000,000 | 88,000,000 | 30,344,000 | - | 95,792,170 | 80,814,275 | 30,336,614 | - | 4,207,830 | 7,185,725 | 7,386 | - | 198,114,667 | 186,718,649 |
| 1. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100,000,000 | 88,000,000 | 30,344,000 | | 95,792,170 | 80,814,275 | 30,336,614 | | 4,207,830 | 7,185,725 | 7,386 | | 198,114,667 | 186,718,649 |
| 05 | Program Perencanaan Anggaran SKPD | 150,000,000 | 190,288,000 | 150,175,000 | - | 148,504,730 | 180,620,952 | 148,886,188 | - | 1,495,270 | 9,667,048 | 1,288,812 | - | 390,346,333 | 378,754,411 |
| 1. | Penyusunan Anggaran SKPD | 150,000,000 | 190,288,000 | 150,175,000 | | 148,504,730 | 180,620,952 | 148,886,188 | | 1,495,270 | 9,667,048 | 1,288,812 | | 390,346,333 | 378,754,411 |
| 06 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 714,000,000 | 579,228,000 | 176,260,000 | - | 708,536,247 | 577,873,111 | 174,710,000 | - | 5,463,753 | 1,354,890 | 1,550,000 | - | 1,351,981,333 | 1,344,646,024 |
| 1. | Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani | 552,000,000 | 579,228,000 | 176,260,000 | | 547,627,307 | 577,873,111 | 174,710,000 | | 4,372,693 | 1,354,890 | 1,550,000 | | 1,189,981,333 | 1,183,737,084 |
| 2. | Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani | 162,000,000 | | | | 160,908,940 | | | | 1,091,060 | | | | 162,000,000 | 160,908,940 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------|---------------|-------------|---|---------------|---------------|-------------|---|-------------|------------|-----------|---|------------------|---------------|
| 07 | Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan | 2,296,449,807 | 1,451,148,000 | 80,150,000 | - | 2,117,337,206 | 1,448,051,350 | 80,150,000 | - | 179,112,601 | 3,096,650 | - | - | 3,774,314,474 | 3,238,996,003 |
| 1. | Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah | 1,203,264,000 | 1,451,148,000 | 80,150,000 | | 1,192,531,710 | 1,448,051,350 | 80,150,000 | | 10,732,290 | 3,096,650 | - | | 2,681,128,667 | 2,667,299,727 |
| 2. | Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon | 729,185,807 | | | | 638,957,358 | | | | 90,228,449 | | | | 729,185,807 | 285,848,138 |
| 3. | Kerjasama Regional/Nasional/Internasional Penyediaan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Komplementer | 364,000,000 | | | | 285,848,138 | | | | 78,151,862 | | | | 364,000,000 | 285,848,138 |
| 08 | Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | 3,441,686,135 | 884,097,020 | 306,080,000 | - | 2,926,121,094 | 784,266,720 | 304,050,000 | - | 515,565,041 | 99,830,300 | 2,030,000 | - | 4,427,809,822 | 3,811,737,814 |
| 1. | Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | 474,100,000.00 | 323,637,020 | 242,480,000 | | 345,685,482 | 316,769,094 | 240,650,000 | | 128,414,518 | 6,867,926 | 1,830,000 | | 878,563,686.67 | 742,671,243 |
| 2. | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | 2,213,236,000.00 | | | | 1,940,087,050 | | | | 273,148,950 | | | | 2,213,236,000.00 | 1,940,087,050 |
| 3. | Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | 260,000,000.00 | | | | 258,032,660 | | | | 1,967,340 | | | | 260,000,000.00 | 258,032,660 |
| 4. | Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | 494,350,135.35 | 560,460,000 | 63,600,000 | | 382,315,902 | 467,497,626 | 63,400,000 | | 112,034,233 | 92,962,374 | 200,000 | | 1,076,010,135.35 | 870,946,861 |
| 09 | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | 4,059,607,000 | 2,463,688,190 | 716,358,950 | - | 3,714,634,793 | 2,419,553,655 | 708,082,100 | - | 344,972,207 | 44,134,535 | 8,276,850 | - | 6,687,081,507 | 6,334,160,807 |
| 1. | Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan | 667,200,000 | | | | 612,788,567 | | | | 54,411,433 | | | | 667,200,000 | 612,788,567 |
| 2. | Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan | 615,000,000 | | | | 598,274,830 | | | | 16,725,170 | | | | 615,000,000 | 598,274,830 |
| 3. | Penyusunan database potensi produksi pertanian | 400,000,000 | 1,078,230,000 | 277,200,000 | | 393,373,380 | 1,069,456,800 | 277,200,000 | | 6,626,620 | 8,773,200 | - | | 1,570,630,000 | 1,555,230,180 |
| 4. | Pengembangan intensifikasi dan penerapan teknologi budidaya tanaman pertanian | 664,600,000 | 543,228,000 | 137,196,500 | | 641,565,808 | 539,461,300 | 137,196,500 | | 23,034,192 | 3,766,700 | - | | 1,253,560,167 | 1,226,759,275 |
| 5. | Pengembangan perbenihan/perbibitan tanaman pertanian | 308,000,000 | 387,956,850 | 159,937,450 | | 296,487,517 | 375,769,102 | 151,661,050 | | 11,512,483 | 12,187,748 | 8,276,400 | | 749,269,333 | 722,810,303 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|---------------|-------------|---|---------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|-----------|---|---------------|---------------|
| 6. | Peningkatan perlindungan dan keamanan produksi tanaman pertanian | 167,412,500 | 127,218,200 | 90,995,000 | | 159,653,110 | 123,300,791 | 90,994,550 | | 7,759,390 | 3,917,409 | 450 | | 324,962,367 | 313,285,418 |
| 7. | Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian | 218,194,500 | 248,929,840 | 51,030,000 | | 159,517,480 | 239,455,646 | 51,030,000 | | 58,677,020 | 9,474,194 | - | | 484,134,340 | 415,983,126 |
| 8. | Pengembangan penerapan teknologi pasca panen tanaman pertanian | 150,000,000 | 78,125,300 | | | 144,345,451 | 72,110,016 | | | 5,654,549 | 6,015,284 | - | | 153,125,300 | 180,400,459 |
| 9. | Pengembangan intensifikasi budidaya tanaman perkebunan | 869,200,000 | | | | 708,628,650 | | | | 160,571,350 | | | | 869,200,000 | 708,628,650 |
| 10 | Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan | 1,584,458,000 | 2,001,030,461 | 841,075,764 | - | 1,448,771,431 | 1,848,300,026 | 840,975,390 | - | 135,686,569 | 152,730,435 | 100,374 | - | 3,344,647,049 | 3,127,722,799 |
| 1. | Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan | 697,565,000 | 758,070,461 | 731,745,859 | | 688,558,600 | 750,902,727 | 731,645,485 | | 9,006,400 | 7,167,734 | 100,374 | | 1,699,550,747 | 1,683,343,155 |
| 2. | Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan | 285,000,000 | 200,560,000 | 109,329,905 | | 268,834,681 | 198,049,723 | 109,329,905 | | 16,165,319 | 2,510,277 | - | | 522,003,302 | 503,327,705 |
| 3. | Pengembangan sarana dan prasarana penyuluh | 601,893,000 | 1,042,400,000 | | | 491,378,150 | 899,347,577 | | | 110,514,850 | 143,052,423 | - | | 1,123,093,000 | 941,051,938 |
| 11 | Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak | 443,833,735 | 291,332,500 | 153,924,600 | - | 422,853,814 | 287,635,814 | 148,797,100 | - | 20,979,921 | 3,696,686 | 5,127,500 | - | 786,474,435 | 49,599,035 |
| 1. | Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak | 443,833,735 | 291,332,500 | 153,924,600 | | 422,853,814 | 287,635,814 | 148,797,100 | | 20,979,921 | 3,696,686 | 5,127,500 | | 786,474,435 | 49,599,035 |
| 12 | Program peningkatan produksi hasil peternakan | 2,431,780,000 | 3,088,456,700 | 375,951,200 | - | 1,445,754,411 | 3,071,626,805 | 375,151,200 | - | 986,025,589 | 16,829,895 | 800,000 | - | 5,645,553,767 | 4,642,431,616 |
| 1. | Pembibitan dan perawatan ternak | 2,236,180,000 | 2,867,858,800 | 277,751,200 | | 1,270,244,561 | 2,852,007,442 | 276,951,200 | | 965,935,439 | 15,851,358 | 800,000 | | 5,196,622,533 | 4,214,569,070 |
| 2. | Pengembangan agribisnis peternakan | 195,600,000 | 220,597,900 | 98,200,000 | | 175,509,850 | 219,619,363 | 98,200,000 | | 20,090,150 | 978,537 | - | | 448,931,233 | 427,862,546 |
| 13 | Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan | 170,000,000 | 138,601,991 | 20,400,000 | - | 155,224,540 | 131,290,598 | 20,400,000 | - | 14,775,460 | 7,311,393 | - | - | 315,401,991 | 293,315,138 |
| 1. | Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah | 170,000,000 | 138,601,991 | 20,400,000 | | 155,224,540 | 131,290,598 | 20,400,000 | | 14,775,460 | 7,311,393 | - | | 315,401,991 | 293,315,138 |
| 14 | Program peningkatan penerapan teknologi peternakan | 372,000,000 | 265,807,273 | - | - | 368,949,710 | 264,486,896 | - | - | 3,050,290 | 1,320,377 | - | - | 504,903,637 | 501,193,158 |
| 1. | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna | 372,000,000 | 265,807,273 | | | 368,949,710 | 264,486,896 | | | 3,050,290 | 1,320,377 | - | | 504,903,637 | 501,193,158 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|---------------|----------------|---|---------------|---------------|----------------|---|-------------|------------|-------------|---------------|----------------|
| 15 | Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian | - | 5,930,290,092 | 1,852,082,244 | - | - | 5,709,114,112 | 1,839,660,086 | - | - | 221,175,981 | 12,422,158 | - | 6,856,331,214 | 6,628,944,155 |
| 1. | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna | | 2,591,732,600 | 1,574,369,122 | | | 2,434,408,730 | 1,562,346,964 | | | 157,323,870 | 12,022,158 | | 3,378,917,161 | 3,215,582,212 |
| 2. | Penyediaan sarana produksi pertanian | | 1,245,695,000 | 130,000,000 | | | 1,241,372,438 | 130,000,000 | | | 4,322,562 | - | | 1,310,695,000 | 1,306,372,438 |
| 3. | Fasilitasi pembiayaan pertanian | | 192,560,000 | 36,913,122 | | | 183,663,416 | 36,913,122 | | | 8,896,584 | - | | 211,016,561 | 202,119,977 |
| 16 | Peningkatan Produksi Hortikultura | - | 950,151,246 | 55,400,000 | - | - | 924,834,764 | 55,200,000 | - | - | 25,316,482 | 200,000 | - | 977,851,246 | 952,434,764 |
| 1. | Pengembangan perbenihan dan perlindungan tanaman Hortikultura | | 704,951,246 | 30,200,000 | | | 686,236,761 | 30,000,000 | | | 18,714,485 | 200,000 | | 720,051,246 | 701,236,761 |
| 2. | Peningkatan produksi Hortikultura | | 245,200,000 | 25,200,000 | | | 238,598,003 | 25,200,000 | | | 6,601,998 | - | | 257,800,000 | 251,198,003 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | - | - | - | 17,653,627,011 | - | - | - | 17,257,939,707 | - | - | - | 395,687,304 | 626,788,358 | 17,257,939,707 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 | 20,600,000 | 0 | 0 | 0 | 20,600,000 | | | | - | 20,600,000 | 20,600,000 |
| 2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 | 5,905,000 | 0 | 0 | 0 | 5,905,000 | | | | - | 5,905,000 | 5,905,000 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 0 | 0 | 0 | 17,019,238,653 | 0 | 0 | 0 | 16,723,695,165 | | | | 295,543,488 | | 16,723,695,165 |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 4 | Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran | 0 | 0 | 0 | 23,600,000 | 0 | 0 | 0 | 23,600,000 | | | | - | 23,600,000 | 23,600,000 |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 | 0 | 0 | 7,600,000 | 0 | 0 | 0 | 7,600,000 | | | | - | | 7,600,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------------|---|---|---|-------------|--|--|------------|-------------|-------------|
| | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1 | Pelaporan pengelolaan retribusi daerah | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 42,051,748 | 0 | 0 | 0 | 40,808,815 | | | 1,242,933 | 42,051,748 | 40,808,815 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 0 | 0 | 0 | 6,705,000 | 0 | 0 | 0 | 6,500,450 | | | 204,550 | 6,705,000 | 6,500,450 |
| 4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 | Fasilitas Kunjungan Tamu | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | Pengadaan Mebel | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 | 0 | 0 | 8,800,000 | 0 | 0 | 0 | 8,800,000 | | | - | 8,800,000 | 8,800,000 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 0 | 0 | 0 | 239,400,000 | 0 | 0 | 0 | 152,952,437 | | | 86,447,563 | 239,400,000 | 152,952,437 |
| 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 0 | 0 | 216,752,000 | 0 | 0 | 0 | 207,846,000 | | | 8,906,000 | 216,752,000 | 207,846,000 |
| 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 0 | 0 | 0 | 42,906,100 | 0 | 0 | 0 | 42,885,290 | | | 20,810 | 42,906,100 | 42,885,290 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|-------------|---------------|---------------|
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | - |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0 | 0 | 0 | 20,068,510 | 0 | 0 | 0 | 16,746,550 | | | | 3,321,960 | 20,068,510 | 16,746,550 |
| 2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | - | - | - | 6,529,855,651 | - | - | - | 5,602,184,055 | - | - | - | 927,671,596 | 6,529,855,651 | 5,602,184,055 |
| 1 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 0 | 0 | 0 | 477,938,980 | 0 | 0 | 0 | 381,995,490 | | | | 95,943,490 | 477,938,980 | 381,995,490 |
| 3 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 0 | 0 | 0 | 935,582,660 | 0 | 0 | 0 | 837,685,202 | | | | 97,897,458 | 935,582,660 | 837,685,202 |
| 4 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | - |
| 5 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | 0 | 0 | 0 | 3,662,005,211 | 0 | 0 | 0 | 3,291,424,766 | | | | 370,580,445 | 3,662,005,211 | 3,291,424,766 |
| 6 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 0 | 0 | 0 | 1,305,175,550 | 0 | 0 | 0 | 961,569,247 | | | | 343,606,303 | 1,305,175,550 | 961,569,247 |
| 7 | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | - |
| 8 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | 0 | 0 | 0 | 15,653,250 | 0 | 0 | 0 | 11,952,750 | | | | 3,700,500 | 15,653,250 | 11,952,750 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|------------|---------------|---------------|
| | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | - |
| 1 | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | 0 | 0 | 0 | 23,570,000 | 0 | 0 | 0 | 23,570,000 | | | | - | 23,570,000 | 23,570,000 |
| 2 | Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | 0 | 0 | 0 | 109,930,000 | 0 | 0 | 0 | 93,986,600 | | | | 15,943,400 | 109,930,000 | 93,986,600 |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | - | - | 3,171,230,925 | - | - | - | 3,071,285,136 | - | - | - | 99,945,789 | 3,171,230,925 | 3,071,285,136 |
| | Pengembangan Prasarana Pertanian | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | 0 | 0 | 0 | 119,876,420 | 0 | 0 | 0 | 106,899,114 | | | | 12,977,306 | 119,876,420 | 106,899,114 |
| 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | 0 | 0 | 0 | 266,881,655 | 0 | 0 | 0 | 255,328,014 | | | | 11,553,641 | 266,881,655 | 255,328,014 |
| | Pembangunan Prasarana Pertanian | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | - | | - |
| 1 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | 0 | 0 | 0 | 870,000,000 | 0 | 0 | 0 | 870,000,000 | | | | - | 870,000,000 | 870,000,000 |
| 2 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | 0 | 0 | 0 | 360,000,000 | 0 | 0 | 0 | 360,000,000 | | | | - | 360,000,000 | 360,000,000 |
| 3 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 0 | 0 | 0 | 162,000,000 | 0 | 0 | 0 | 161,042,866 | | | | 957,134 | 162,000,000 | 161,042,866 |
| 4 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya | 0 | 0 | 0 | 1,163,088,850 | 0 | 0 | 0 | 1,088,788,642 | | | | 74,300,208 | 1,163,088,850 | 1,088,788,642 |
| 5 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 | | | | - | 200,000,000 | 200,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-------------|---|---|---|-------------|--|--|--|------------|-------------|-------------|
| | Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | - | | - |
| 1 | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | 0 | 0 | 0 | 29,384,000 | 0 | 0 | 0 | 29,226,500 | | | | 157,500 | 29,384,000 | 29,226,500 |
| | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | 767,804,800 | | | | 728,058,372 | | | | 39,746,428 | 767,804,800 | 728,058,372 |
| | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 1 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | 0 | 0 | 0 | 314,630,000 | 0 | 0 | 0 | 286,608,455 | | | | 28,021,545 | 314,630,000 | 286,608,455 |
| | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 1 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | 0 | 0 | 0 | 132,727,000 | 0 | 0 | 0 | 132,242,966 | | | | 484,034 | 132,727,000 | 132,242,966 |
| | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | 0 | 0 | 0 | 43,385,000 | 0 | 0 | 0 | 35,027,250 | | | | 8,357,750 | 43,385,000 | 35,027,250 |
| 2 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 0 | 0 | 0 | 196,637,800 | 0 | 0 | 0 | 195,271,196 | | | | 1,366,604 | 196,637,800 | 195,271,196 |
| | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 1 | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | 0 | 0 | 0 | 40,062,000 | 0 | 0 | 0 | 40,008,080 | | | | 53,920 | 40,062,000 | 40,008,080 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| 2 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 0 | 0 | 0 | 40,363,000 | 0 | 0 | 0 | 38,900,425 | | | | 1,462,575 | 40,363,000 | 38,900,425 |
| 3 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | - | - | - | 564,209,800 | - | - | - | 488,701,531 | - | - | - | 75,508,269 | 564,209,800 | 488,701,531 |
| | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 0 | 0 | 0 | 319,340,900 | | | | 264,750,847 | | | | 54,590,053 | 319,340,900 | 264,750,847 |
| 2 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 0 | 0 | 0 | 126,680,000 | | | | 112,408,460 | | | | 14,271,540 | 126,680,000 | 112,408,460 |
| 3 | Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis | 0 | 0 | 0 | 21,646,500 | | | | 21,256,900 | | | | 389,600 | 21,646,500 | 21,256,900 |
| 4 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | 0 | 0 | 0 | 96,542,400 | | | | 90,285,324 | | | | 6,257,076 | 96,542,400 | 90,285,324 |
| | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | - | - | - | 1,654,044,702 | - | - | - | 1,507,579,912 | - | - | - | 146,464,790 | 1,654,044,702 | 1,507,579,912 |
| | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | 0 | 0 | 0 | 980,997,702 | | | | 947,333,795 | | | | 33,663,907 | 980,997,702 | 947,333,795 |
| 2 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 0 | 0 | 0 | 422,270,000 | | | | 408,044,670 | | | | 14,225,330 | 422,270,000 | 408,044,670 |
| 3 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 0 | 0 | 0 | 172,005,000 | | | | 75,258,748 | | | | 96,746,252 | 172,005,000 | 75,258,748 |
| 4 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | 78,772,000 | | | | 76,942,699 | | | | 1,829,301 | 78,772,000 | 76,942,699 |
| | JUMLAH | 18,695,014,677.35 | 20,668,840,168 | 16,870,504,730 | 30,340,772,889 | 16,107,295,242 | 19,959,082,108.10 | 16,783,944,008 | 28,728,862,603 | 2,587,719,435 | 709,758,060 | 86,560,722 | 1,611,910,286 | 63,819,552,798 | 60,032,537,009 |

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Sektor pertanian memegang peranan cukup penting dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan karena sektor pertanian merupakan Resource Based yang mampu menyerap dan memperluas kesempatan usaha/lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

Dalam pelaksanaan urusan pertanian, permasalahan yang dihadapi adalah:

- Semakin sempitnya lahan pertanian sebagai akibat alih fungsi lahan
- Lahan kritis dan cuaca yang tidak menentu merupakan salah satu faktor penghambat keberhasilan perkembangan tanaman;
- Gangguan penyakit dari hewan ke manusia seperti rabies, flu burung dan Covid 19 ;
- Lemahnya posisi tawar dan akses permodalan untuk membiayai usaha taninya
- Masih rendahnya SDM petani sehingga kemampuan dalam mengelola usahanya kurang optimal

b. Peluang

Adapun peluang dalam menjawab tantangan tersebut adalah:

- Kebijakan yang diambil dalam rangka mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian, yaitu melalui pemilihan komoditas pertanian yang memiliki produktivitas tinggi, memiliki nilai ekonomi tinggi, dan mempunyai peluang pasar yang terbuka serta dapat dikembangkan pada lahan sempit, sehingga diharapkan keterbatasan lahan bukan menjadi kendala untuk usaha dibidang pertanian;
- Komitmen Pemerintah dalam pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan;
- Pendanaan APBD dan APBN yang semakin berorientasi terhadap kinerja;
- Kesadaran masyarakat dalam mencegah penyakit zoonosis tinggi.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng yang berkaitan dengan pelayanan di bidang pertanian dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal;
- Kurangnya data dan informasi pertanian yang aktual dan terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak berkepentingan (*stakeholder*);
- Masih kurangnya SDM petugas yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
- Masih lemahnya SDM petani baik pengetahuan, keterampilan dan sikapnya;
- Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
- Belum terwujud pola perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- Pengembangan kawasan pertanian belum optimal;
- Integrasi antara tanaman, ternak dan komponen pertanian lainnya belum optimal;
- Belum optimalnya sertifikasi produk pertanian;
- Belum adanya kawasan pertanian organik yang terstandarisasi dan tersertifikasi sehingga mampu menghasilkan produk pertanian yang dapat bersaing dalam segmen pasar premium;
- Adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
- Ketersediaan air irigasi cenderung menurun beberapa tahun terakhir dan diperkirakan akan terus mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.
- Sulitnya mendapatkan bibit ternak yang berkualitas tinggi dalam jumlah yang cukup;
- Usaha peternakan pada umumnya masih dilaksanakan secara subsisten (usaha sampingan) dengan skala kecil, sehingga belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- Terbatasnya ketersediaan pakan ternak yang berbasis bahan lokal dengan kualitas baik dan dengan harga terjangkau oleh peternak;
- Kualitas daging sapi Bali masih dianggap relatif alot/keras, sehingga belum banyak diserap untuk memenuhi kebutuhan hotel dan restoran di Bali;
- Adanya beberapa penyakit unggas dan ternak lainnya yang berpotensi menular ke manusia seperti flu burung dan rabies merupakan suatu permasalahan yang

- perlu penanganan lebih sistematis, karena selain dapat menimbulkan kerugian berupa kematian ternak, juga menyebabkan ancaman bagi kesehatan manusia;
- Terbatasnya akses petani dan peternak terhadap pendanaan di luar pemerintah khususnya dana perbankan dan sektor swasta lainnya yang menyebabkan beban pemerintah dan investasi pembangunan di sektor usaha pertanian menjadi lebih besar.

Melihat permasalahan yang dihadapi, maka perlu dicarikan solusi terbaik untuk mengatasi segala tantangan/hambatan yang dapat mengancam keberlanjutan sektor pertanian dalam arti luas yang sejatinya adalah warisan budaya leluhur yang patut dipertahankan dan dilestarikan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Dalam kurun lima tahun ke depan, Dinas Pertanian akan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki secara optimal untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan, tentunya dengan kerjasama yang baik antara segenap jajaran perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang peduli dengan sektor pertanian di Kabupaten Buleleng, dimana keberadaannya perlu dipertahankan dan dilestarikan sepanjang masa.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Buleleng

Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Buleleng saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng yang dicanangkan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah (masa transisi) sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Buleleng yang tercantum di RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA"

Visi itu bermakna sebagai berikut:

1. **Mandiri** mengandung makna: Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Sejahtera** mengandung makna: Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.
3. **Berdaya Saing** mengandung makna: Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komperatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.

4. **Berlandaskan Tri Hita Karana** mengandung makna: Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka tindakan yang akan dilakukan (misi) selama periode 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
2. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, berbudaya dan berintegritas;
4. Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan
6. Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan (*sustainable development*)

Adapun misi kedua yang diamanatkan pencapaiannya pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng yaitu : ” Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah “

Sebagai upaya mewujudkan pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, maka faktor penghambat dan factor pendorong pelayanan Dinas Pertanian berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah (masa transisi) ditunjukkan oleh Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati Buleleng (masa transisi)

| Nomor / Misi | | Sasaran | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
|--------------|---|-------------------------------------|---|--|--|
| | | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |
| I | Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah | Meningkatnya nilai produk pertanian | - Adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian | - Belum adanya regulasi perlindungan lahan pertanian | - Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| | | | <div>- Integrasi antara tanaman, ternak dan komponen pertanian lainnya belum optimal</div> | <div>- Masih lemahnya SDM petani baik pengetahuan, keterampilan dan sikapnya</div> | <div>- Dukungan anggaran yang memadai untuk peningkatan kapasitas petani</div> |
| | | | <div>- Masih minimnya kawasan pertanian organik yang terstandarisasi dan tersertifikasi</div> | <div>- Minimnya kesadaran masyarakat akan manfaat produk organik</div> | <div>- Terdapat penetapan kawasan organik untuk beberapa komoditi pertanian</div> |
| | | | <div>- Belum terwujudnya pola perlindungan lahan pertanian berkelanjutan</div> | <div>- Belum adanya regulasi perlindungan lahan pertanian</div> | <div>- Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan</div> |
| | | | <div>- Lemahnya posisi tawar petani dan akses permodalan untuk membiayai usaha tani</div> | <div>- Mutu produksi pertanian relatif rendah</div> | <div>- Adanya inovasi dan introduksi teknologi pertanian</div> |
| | | | | <div>- Masih rendahnya informasi permodalan</div> | <div>- Adanya lembaga keuangan mikro</div> |
| | | | <div>- Pengembangan kawasan pertanian belum optimal</div> | <div>- Rendahnya penerapan teknologi pertanian/peternakan tepat guna</div> | <div>- Adanya inovasi dan introduksi teknologi pertanian</div> |
| | | | <div>- Belum optimalnya sertifikasi produk pertanian</div> | <div>- Belum optimalnya sinergitas tupoksi lintas sektor</div> | <div>- Dukungan anggaran yang memadai</div> |
| | | | <div>- Minimnya kawasan pertanian organik yang terstandarisasi dan tersertifikasi</div> | <div>- Minimnya kesadaran masyarakat akan manfaat produk organik</div> | <div>- Terdapat penetapan kawasan organik untuk beberapa komoditi pertanian</div> |
| | | | <div>- Integrasi antara tanaman, ternak dan komponen pertanian lainnya belum optimal</div> | <div>- Masih lemahnya SDM petugas dan petani baik pengetahuan, keterampilan dan sikapnya</div> | <div>- Dukungan anggaran yang memadai untuk peningkatan kapasitas petani</div> |
| | | | <div>- Belum optimalnya hubungan antar petugas dengan lembaga keuangan untuk permodalan</div> | <div>- Kemampuan permodalan dan penerapan teknologi pertanian terbatas</div> | <div>- Adanya lembaga keuangan yang memberi akses permodalan yang memadai</div> |

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Visi Kementerian Pertanian RI adalah Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. Dalam Renstra Kementerian Pertanian 2020 – 2024, Misi yang ditetapkan ada 3 yaitu :

- 1. Mewujudkan Ketahanan Pangan.
- 2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian.
- 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Strategi Pembangunan Pertanian 2020 – 2024 adalah :

- 1. Menjadikan basis produksi komoditas pangan, komoditas ekspor, penyedia bahan baku industri dan bio-energi dengan pendekatan kawasan
- 2. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk pertanian
- 3. Menyediakan prasarana dasar bidang pertanian
- 4. Memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani
- 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran Kementerian Pertanian tahun 2020 – 2024 adalah :

- 1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri
- 2. Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional
- 3. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional
- 4. Termanfaatkannya Inovasi dan Teknologi Pertanian
- 5. Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan
- 6. Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan
- 7. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian melalui Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- 8. Terselenggaranya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif,
- 9. Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pertanian diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pertanian
Kabupaten Buleleng Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian

| Nomor / Misi | | Sasaran | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
|--------------|--------------------------------------|--|---|---|--|
| 1 | | 2 | 3 | Penghambat | Pendorong |
| | | | | 4 | 5 |
| I | Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi | Meningkatnya produksi pertanian yang maju (Sapras, padi, jagung, kedelai, daging dan gula) | <ul style="list-style-type: none">- Kompetensi aparatur dinas belum merata sesuai dengan apa yang diharapkan- Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada SOP | <ul style="list-style-type: none">- Menurunnya minat terhadap usaha tani- Anomali iklim akibat pemanasan global (global warming) | <ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan fasilitas alsintan- Ketersediaan dukungan anggaran |

| | | | | | |
|-----|--|---|--|---|---|
| II | Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian | Berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing | - Sinergitas tupoksi antar bidang belum terjalin dengan baik | - Kemampuan permodalan petani terbatas - Produk komoditas pertanian masih bersifat tentative - Mutu produk masih rendah | - Pertumbuhan pasar modern/AFTA - Adanya lembaga keuangan yang memberi akses permodalan yang memadai |
| III | Mewujudkan kesejahteraan petani | Meningkatnya kualitas sumberdaya insani petani | - Lemahnya posisi tawar petani dan akses permodalan untuk membiayai usaha tani | - Kemampuan permodalan dan penerapan teknologi pertanian terbatas | - Adanya lembaga keuangan yang memberi akses permodalan yang memadai |

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Perda Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 mengatur ketentuan umum zonasi kawasan budidaya yaitu kawasan peruntukan pertanian.

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang yang berkualitas, serasi, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berbudaya Bali berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pertanian dalam arti luas, perikanan, industri dan pariwisata yang berlandaskan Tri Hita Karana.

Strategi pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis agribisnis pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan agrowisata dan ekowisata terdiri atas :

- memantapkan kawasan pertanian lahan pangan berkelanjutan;
- meningkatkan sistem agribisnis tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan yang berorientasi pasar;
- mengembangkan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan berbasis komoditas unggulan yang berdaya saing;
- meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang produksi dan pemasaran;
- meningkatkan penguatan sumber daya manusia di bidang pertanian dan perikanan;
- meningkatkan keterkaitan hasil produksi pertanian dengan sektor industri, perdagangan dan pariwisata;dan
- mengintegrasikan kegiatan pertanian sebagai kawasan agrowisata berbasis ekowisata.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Untuk kawasan budidaya salah satunya adalah kawasan peruntukan

pertanian. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian meliputi pemanfaatan ruang untuk perluasan permukiman tradisional masyarakat setempat secara terbatas dan dengan kepadatan rendah dan pencegahan dan pelarangan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan, kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana penunjang kawasan pertanian, jaringan jalan, jaringan energi listrik, jaringan telekomunikasi dan jaringan air minum.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian Kawasan peruntukan pertanian seluas 48.741,51 Ha atau 35,68% dari luas wilayah kabupaten meliputi kawasan peruntukan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dengan uraian sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud seluas 9.250 ha atau 6,78% dari luas wilayah kabupaten selanjutnya ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, terdapat di :

- Kecamatan Gerokgak seluas kurang lebih 554 Ha;
- Kecamatan Seririt seluas kurang lebih 1.318 Ha;
- Kecamatan Busungbiu seluas kurang lebih 863 Ha;
- Kecamatan Banjar seluas kurang lebih 406 Ha;
- Kecamatan Sukasada seluas kurang lebih 1.832 Ha;
- Kecamatan Buleleng seluas kurang lebih 1.119 Ha;
- Kecamatan Sawan seluas kurang lebih 2.652 Ha;
- Kecamatan Kubutambahan seluas kurang lebih 506 Ha.

2. Kawasan peruntukan tanaman hortikultura

Sebagaimana dimaksud diperuntukkan bagi tanaman pangan dan hortikultura, dan lokasinya tersebar di tiap-tiap kecamatan seluas 5.391 ha mencakup budidaya tanaman buah-buahan, tanaman hias, sayur mayur, dan tanaman biofarmaka meliputi pengembangan tanaman hortikultura dengan komoditas yang berdaya saing pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan terdiri atas:

- Komoditas tanaman buah-buahan mangga, rambutan di Kecamatan Tejakula, Kubutambahan Sawan, Kecamatan Gerokgak;
- Komoditas tanaman hias dan sayur mayur di Kecamatan Sukasada; dan
- Komoditas budidaya tanaman buah-buahan durian, manggis, tanaman hias, sayur mayur, dan tanaman biofarmaka di Kecamatan Seririt, Busungbiu dan Kecamatan Banjar.

3. Kawasan peruntukan perkebunan Diperuntukkan bagi tanaman perkebunan yang menghasilkan bahan baku industri dalam negeri maupun untuk memenuhi ekspor, tersebar di seluruh wilayah kecamatan seluas kurang lebih 20.274 ha atau 15,10% dari luas wilayah kabupaten, meliputi :

- pengembangan perkebunan di seluruh wilayah kecamatan yang dikelola masyarakat yang tergabung dalam subak abian;
- pengembangan perkebunan rakyat dengan komoditas unggulan berdaya saing global pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan terdiri atas:
 - komoditas kopi di kawasan Kecamatan Busungbiu, Sukasada, Tejakula dan Kubutambahan;
 - komoditas kakao di kawasan perkebunan tiap-tiap kecamatan;
 - komoditas cengkeh, vanili di kawasan Kecamatan Busungbiu, Sukasada, Sawan, Kubutambahan dan Tejakula;
 - komoditas tembakau virginia di kawasan kecamatan Buleleng dan Sukasada;
 - komoditas kelapa, jambu mente, tersebar di tiap kecamatan.

4. Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana diperuntukkan bagi kegiatan peternakan dan tidak dikembangkan dalam bentuk padang penggembalaan ternak sehingga batasan lokasinya tidak dapat dipetakan secara tegas dan diarahkan secara terpadu dan terintegrasi bercampur dengan kawasan peruntukan pertanian, meliputi :

- Pengembangan ternak besar seperti ternak sapi, kambing dan lainnya dikembangkan secara berkelompok maupun individu tergabung dalam permukiman perdesaan dan peruntukan pertanian dalam arti luas;
- Pengembangan ternak kecil dalam bentuk usaha peternakan seperti peternakan ayam, itik diarahkan untuk tidak berdampingan langsung dengan kawasan permukiman;
- Pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan makanan ternak secara terpadu dan terintegrasi; dan
- Pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan, untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga.

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap kebijakan, rencana, dan program pembangunan, termasuk RPD merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kewajiban melaksanakan KLHS RPD juga diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Guna memenuhi ketentuan perundang-undangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup dan perencanaan pembangunan telah melakukan KLHS terhadap Rancangan Awal RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Laporan KLHS yang telah divalidasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali selanjutnya menjadi salah satu kelengkapan yang harus disertakan pada saat Ranperda tentang RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 disampaikan kepada Gubernur Bali untuk mendapatkan evaluasi.

Isu-isu strategis lingkungan hidup Kabupaten Buleleng yang dirumuskan berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) adalah sebagai berikut.

1. Menurunnya kondisi daerah aliran sungai (DAS);
2. Pencemaran lingkungan oleh air limbah;
3. Buruknya sanitasi lingkungan, terutama karena pengelolaan persampahan yang belum optimal;
4. Kerusakan ekosistem laut, terutama terumbu karang dan padang lamun;
5. Ancaman perubahan iklim.
6. Rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat, terutama generasi muda;
7. Daya saing UMKM masih rendah;
8. Kondisi ekonomi perdesaan belum mampu mencegah migrasi tenaga kerja produktif ke wilayah perkotaan ataupun ke luar daerah;
9. Pendapatan perkapita penduduk masih rendah dan belum merata;
10. Iklim investasi belum kondusif;
11. Kondisi infrastruktur kawasan strategis belum optimal;
12. Kesenjangan ekonomi antar wilayah perdesaan dan kecamatan masih tinggi;
13. Lunturnya kearifan lokal karena meningkatnya pengaruh budaya asing;
14. Pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi dan persebaran penduduk tidak merata;

15. Kemiskinan dan pengangguran;
16. PMKS dan pelayanan sosial;
17. Pelestarian budaya;
18. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum optimal;
19. Mutu dan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap semua program yang tertuang dalam rancangan awal RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 menunjukkan bahwa, secara umum Kebijakan, Rencana, dan Program masih diperbolehkan dilaksanakan karena belum melampaui daya dukung lingkungan (DDL) dan daya tampung lingkungan hidup (DTL). Hasil pelaksanaan KLHS merekomendasikan perlunya dilakukan penyempurnaan terhadap 2 program prioritas pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng terutama pada saat diimplementasikan yaitu:

1. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
Alternatif penyempurnaannya adalah agar dalam pelaksanaannya dilakukan dengan menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan (memaksimalkan penggunaan input-input organik, menerapkan sistem pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, meningkatkan daya pegang air tanah, dan sebagainya).
2. Program pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner
Alternatif penyempurnaannya adalah agar dalam implementasinya diarahkan di luar kawasan pemukiman, disertai pengelolaan (pengolahan dan pemanfaatan) limbah ternak, seperti pembuatan instalasi biogas, pengolahan air limbah ternak, pembuatan kompos, pembuatan biourine, dll.

Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng sebagai pengampu di bidang pertanian mengacu kepada arahan diatas, yaitu pengendalian dan pengembangan pemanfaatan lahan pertanian dengan strategi meliputi :

- Mengembangkan potensi komoditas pertanian unggulan daerah;
- Mengembangkan potensi pertanian terpadu agrowisata dan ekowisata;
- Meningkatkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian;
- Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu pertanian yang berkelanjutan; dan
- Mengendalikan alih fungsi lahan produktif.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Buleleng dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

1. Rendahnya Produksi Pertanian
2. Lemahnya daya saing dan mutu produk pertanian
3. SDM Pertanian rendah

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1(satu) sampai dengan 4 (empat) tahun. Tujuan ditetapkan berdasarkan masing-masing misi pembangunan daerah, dan setiap tujuan dijabarkan menjadi sasaran-sasaran dengan indikator-indikatornya.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dengan dokumen RPD Kabupaten Buleleng 2023-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen Rencana Pemerintah Daerah tersebut sebagai acuan, Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng berkontribusi untuk mewujudkan Misi dalam RPD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas mendukung pencapaian Misi Bupati dan Wakil Bupati (masa transisi), kemudian diuraikan lebih lanjut dalam formula tujuan dan sasaran pada RPD Kabupaten Buleleng 2023-2026 sebagai berikut:

- Misi : Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah
- Tujuan : Berkembangnya produk unggulan daerah
- Sasaran : Meningkatkan nilai produk pertanian

Sesuai dengan Tujuan pada masing-masing Misi dalam RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 berdasarkan urusan dan kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menetapkan tujuan sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PRODUKSI PERTANIAN YANG BERDAYA SAING DAN PEMASARAN KOMODITAS PERTANIAN”

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam periode 4 (empat) tahun ke depan. Perumusan sasaran tentunya memperhatikan indikator kinerja sesuai Tupoksi Dinas Pertanian serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk periode 2023-2026, Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Produksi Pertanian yang Maju
2. Terwujudnya Produksi Pertanian yang Mandiri

3. Terwujudnya Produksi dan Pemasaran Pertanian yang Modern

Adapun keterkaitan antara sasaran dalam RPD Kabupaten Buleleng dengan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Keterkaitan antara Sasaran dalam RPD Kabupaten Buleleng dengan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng

| RPJMD Kabupaten Buleleng | | Renstra Dinas Pertanian | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| Tujuan | Sasaran | Tujuan | Sasaran |
| Misi . Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah | | | |
| Berkembangnya produk unggulan daerah | Meningkatnya nilai produk pertanian | Terwujudnya Produksi Pertanian yang Berdaya Saing dan Pemasaran Komoditas Pertanian | 1.Meningkatnya Produksi Pertanian yang Maju 2.Terwujudnya Produksi Pertanian yang Mandiri 3.Terwujudnya Produksi dan Pemasaran Pertanian yang Modern |

Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Pelayanan Perangkat Daerah dengan indikator tujuan/sasaran dan target kinerja tujuan/sasaran RPD ditunjukkan oleh Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran RPD Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026

| No | Tujuan | Sasaran ES II | Indikator Tujuan/Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | | Awal (2022) | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- | | | |
|----|---|---|---|---|-------------|-------------|--|--------|--------|--------|
| | | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Terwujudnya Produksi Pertanian yang berdaya saing | Meningkatnya Produksi Pertanian yang Maju | Persentase peningkatan produksi Pertanian (%) | | | 48.18 | 59.01 | 66.30 | 73.07 | 79.53 |
| | | | | Jumlah benih ternak (straw) unggul | PKH | 16,000.00 | 17,000 | 18,000 | 19,000 | 20,000 |
| | | | | Jumlah petugas yang berkompeten | PKH | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 |
| | | | | Jumlah Penangkar Benih Berkompeten | horti | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | TP | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | BUN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Jumlah Sumber Benih Berkualitas | TP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | HORTI | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | BUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | Jumlah pestisida nabati | HORTI | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Jumlah obat/vaksin peternakan (dosis) | PKH | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 2,750 | 3,000 |
| | | | | Jumlah tempat pelayanan peternakan | PKH | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | | Jumlah alat dan mesin peternakan | PKH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | Jumlah sumber air pertanian | PSP | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | Jumlah jalan pertanian yang memadai | PSP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | Jumlah alat mesin prapanen | PSP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | Jumlah alat mesin pasca panen | HORTI TP | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Terwujudnya Produksi Pertanian yang Mandiri | Persentase Kelembagaan Petani dan pelaku usaha yang Mandiri (%) | | | | 2.85 | 2.97 | 3.08 | 3.19 | 3.30 |
| | | | | Jumlah SDA Pertanian berpotensi | penyuluhan | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Jumlah Potensi wilayah | penyuluhan | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | | | Jumlah Penyuluh bersertifikat | penyuluhan | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| | | | | jumlah Penyuluh swadaya | penyuluhan | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| | | | | Jumlah petani/Poktan/gapoktan dgn skor kemampuan Klas Madya | penyuluhan | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| | | | | Jumlah pengelolaan pertanian dan peternakan sesuai aspek teknis | PKH | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | | | Jumlah sarpras pertanian dan peternakan | PKH | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | | | Jumlah fasilitas pendukung smartfarming | penyuluhan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | Jumlah POKTAN dengan biaya swadaya | penyuluhan | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | jumlah POKTAN yang dibiayai lembaga keuangan | PSP | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |

Lanjutan Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran RPD Pelayanan Perangkat Daerah

| No | Tujuan | Sasaran ES II | Indikator Tujuan/Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | | Awal (2022) | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- | | | |
|----|--------|--|--|--|-----------------|-------------|--|------------|------------|------------|
| | | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Terwujudnya Produksi dan Pemasaran Pertanian yang Modern | Persentase Produksi Pertanian dengan teknologi % | | | 3 | 3.10 | 3.11 | 3.12 | 3.13 |
| | | | | jumlah jenis produk pertanian HASIL INOVASI | TP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | horti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | bun | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | PKH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | Jumlah penerapan hasil riset di tingkat pengguna | horti | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | PKH | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | bun | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | PEYULUHAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | Jumlah hasil produksi pertanian ; | jumlah Produksi | 308,289.50 | 317,846.47 | 317,877.30 | 317,908.13 | 317,938.96 |
| | | | | Produksi padi (Ton) | TP | 106,660.50 | 109,966.98 | 109,977.64 | 109,988.31 | 109,998.97 |
| | | | | Produksi palawija (Ton) | TP | 37,033.00 | 38,181.02 | 38,184.73 | 38,188.43 | 38,192.13 |
| | | | | Produksi Hortikultura (Ton) | HORTI | 137,855.00 | 142,128.51 | 142,142.29 | 142,156.08 | 142,169.86 |
| | | | | Produksi Perkebunan (Ton) | BUN | 19,000.00 | 19,589.00 | 19,590.90 | 19,592.80 | 19,594.70 |
| | | | | Produksi Daging (Ton) | PKH | 7,741.00 | 7,980.97 | 7,981.75 | 7,982.52 | 7,983.29 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Populasi sapi (Ekor) | | 149,305 | 149,610 | 149,915 | 150,220 | 150,525 |
| | | | | Jumlah produk pertanian yang dipasarkan secara online | TP | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | BUN | | | | | |
| | | | | | HORTI | | | | | |
| | | | | | PKH | | | | | |
| | | | | Jumlah produk pertanian yang dipasarkan secara offline | TP | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | BUN | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | HORTI | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| | | | | | PKH | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | Jumlah pelaksanaan temu usaha pertanian | TP | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | BUN | | | | | |
| | | | | | HORTI | | | | | |
| | | | | Jumlah MoU Produk Pertanian yang ditindaklanjuti | BUN | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | | | | | HORTI | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | PKH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Dalam merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan instrumen analisis SWOT (*Strengths*/kekuatan, *Weaknesses*/kelemahan, *Opportunities*/peluang, dan *Threats*/tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*).

Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

1. Komponen Lingkungan Internal yang menjadi kekuatan (*Strength*) adalah:
 - Sumber Daya Alam yang tersedia cukup luas dan potensial untuk pengembangan komoditas pertanian.
 - Sumber Daya Manusia sebagai pelaku pembangunan pertanian jumlahnya cukup besar.
 - Kelembagaan yang ada sebagai pendukung pembangunan pertanian cukup memadai.
2. Komponen Lingkungan Internal yang menjadi kelemahan (*Weakness*) adalah:
 - Kualitas, produktivitas dan sikap SDM Pertanian masih rendah.
 - Prasarana dan sarana belum memadai.
 - Koordinasi kelembagaan yang terkait masih lemah.
3. Komponen Lingkungan Eksternal yang dipandang sebagai peluang (*Opportunities*) adalah:
 - Komitmen Pemerintah terhadap pembangunan pertanian
 - Cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - Terbukanya pasar domestik maupun ekspor.
4. Komponen Lingkungan Eksternal yang menjadi ancaman (*Threats*) adalah:
 - Berkurangnya lahan pertanian produktif karena alih fungsi lahan.
 - Produktivitas, mutu dan kontinuitas produk belum optimal.
 - Anomali iklim akibat pemanasan global (*global warming*)

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dilakukan penentuan alternative strategi dengan menempatkan faktor-faktor tersebut ke dalam matriks SWOT. Melalui matriks ini maka akan dihasilkan empat kemungkinan alternative strategi yang dapat ditempuh, yaitu :

- Strategi SO, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
- Strategi ST, yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman
- Strategi WO, yaitu strategi pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada.
- Strategi WT, yaitu strategi yang berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Analisis SWOT tersebut diatas dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Berdasarkan matriks SWOT tersebut, maka diperoleh strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- Manfaatkan sumber daya alam pertanian yang ada untuk meningkatkan produktivitas, mutu dan kontinuitas produk;
- Optimalkan kelembagaan yang ada untuk mendukung komitmen pemerintah terhadap pembangunan pertanian;
- Tingkatkan kualitas, produktivitas dan sikap SDM Pertanian untuk mengoptimalkan produktivitas, mutu dan kontinuitas produk;
- Optimalkan kelembagaan pendukung pembangunan pertanian yang memadai untuk meningkatkan produktivitas, mutu dan kontinuitas produk;
- Tingkatkan prasarana dan sarana untuk mengurangi dampak anomali iklim akibat pemanasan global.

Tabel. 5.1
Matriks SWOT Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng

| <div>Lingkungan Internal (IFAS)</div> <div>Lingkungan Eksternal (EFAS)</div> | <u>Kekuatan (Strengths) :</u> | <u>Kelemahan (Weaknesses) :</u> |
|---|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Sumber Daya Alam yang tersedia cukup luas dan potensial untuk pengembangan komoditas pertanian.• Sumber Daya Manusia sebagai pelaku pembangunan pertanian jumlahnya cukup besar.• Kelembagaan yang ada sebagai pendukung pembangunan pertanian cukup memadai. | <ul style="list-style-type: none">• Kualitas, produktivitas dan sikap SDM Pertanian masih rendah.• Prasarana dan sarana belum memadai.• Koordinasi kelembagaan yang terkait masih lemah. |
| <u>Peluang (Opportunities) :</u> <ul style="list-style-type: none">• Komitmen Pemerintah terhadap pembangunan pertanian• Cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.• Terbukanya pasar domestik maupun ekspor. | <u>Strategi SO</u> <ul style="list-style-type: none">• Optimalkan sumber daya alam yang ada untuk memanfaatkan terbukanya pasar domestik maupun ekspor;• Optimalkan SDM Pertanian untuk memanfaatkan iptek;• Optimalkan kelembagaan yang ada untuk mendukung komitmen pemerintah terhadap pembangunan pertanian | <u>Strategi WO</u> <ul style="list-style-type: none">• Tingkatkan kualitas, produktivitas SDM Pertanian untuk memanfaatkan perkembangan iptek;• Tingkatkan prasarana dan sarana untuk memanfaatkan terbukanya pasar domestik maupun ekspor;• Tingkatkan koordinasi kelembagaan yang terkait untuk mendukung komitmen pemerintah terhadap pembangunan pertanian |
| <u>Ancaman (Threats) :</u> <ul style="list-style-type: none">• Berkurangnya lahan pertanian produktif karena alih fungsi lahan.• Produktivitas, mutu dan kontinuitas produk belum optimal.• Anomali iklim akibat pemanasan global (global warming) | <u>Strategi ST</u> <ul style="list-style-type: none">• Manfaatkan sumber daya alam pertanian yang ada untuk meningkatkan produktivitas, mutu dan kontinuitas produk;• Optimalkan kelembagaan pendukung pembangunan pertanian yang untuk mengantisipasi berkurangnya lahan pertanian produktif akibat alih fungsi lahan;• Optimalkan sumber daya manusia selaku pelaku pembangunan pertanian untuk mengurangi dampak anomali iklim. | <u>Strategi WT</u> <ul style="list-style-type: none">• Tingkatkan kualitas, produktivitas dan sikap SDM Pertanian untuk mengoptimalkan produktivitas, mutu dan kontinuitas produk;• Tingkatkan prasarana dan sarana untuk mengurangi dampak anomali iklim akibat pemanasan global;• Tingkatkan koordinasi kelembagaan terkait untuk mencegah berkurangnya lahan pertanian produktif karena alih fungsi lahan. |

5.2. Arah Kebijakan

Agar strategi tersebut di atas dapat diimplementasikan maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

- Melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan, penerapan GAP/SOP, peningkatan kualitas SDM Pertanian, pengendalian OPT dan peningkatan status kesehatan hewan;
- Pemberdayaan kelembagaan petani, peningkatan diversifikasi pangan dan pengolahan hasil;
- Peningkatan SDM Pertanian;
- Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian;
- Penyediaan prasarana dan sarana pertanian.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan disajikan dalam Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng

| Visi : "TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA" | | | |
|--|---|---|--|
| Misi II : Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah. | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Optimalkan kelembagaan yang ada untuk mendukung komitmen pemerintah terhadap pembangunan pertanian, agar dapat terwujudnya produksi pertanian yang berdaya saing | Meningkatnya Produksi Pertanian yang Maju | Manfaatkan sarana dan prasarana yang tepat guna untuk meningkatkan produksi, mutu dan kontinuitas produk; | Peningkatan produksi dan pertanian di tingkat hulu (Sapras) |
| | | Meningkatkan pemeriksaan kesehatan hewan dan ternak, terutama penyakit zoonosa (penyakit hewan yang menular dan membahayakan manusia). | Meningkatkan pengawasan penyakit zoonosa (penyakit hewan yang menular dan membahayakan manusia). |
| | Terwujudnya Produksi Pertanian yang Mandiri | Optimalkan kelembagaan petani dan pelaku usaha yang mandiri dalam rangka mendukung pembangunan pertanian yang memadai untuk meningkatkan produktivitas, mutu dan kontinuitas produk | Pemberdayaan kelembagaan petani, peningkatan diversifikasi pangan dan pengolahan hasil |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | Melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan, penerapan GAP/SOP, Optimalkan sumber daya alam yang ada untuk memanfaatkan terbukanya pasar domestik maupun ekspor /Tingkatkan kualitas produktivitas dan sikap SDM Pertanian untuk mengoptimalkan produktivitas, mutu dan kontinuitas produk | Peningkatan SDM Pertanian |
| | Terwujudnya Produksi dan Pemasaran Pertanian yang Modern | Mengoptimalkan jumlah jenis produk pertanian HASIL INOVASI dan penerapan hasil riset di tingkat pengguna Mengoptimalkan Jumlah produk pertanian yang dipasarkan secara online dan offline | Peningkatan produksi pertanian dan pemasaran secara modern di tingkat hilir |

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti UU 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muatan UU Pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Salah satu Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Pertanian.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab V, Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng perlu menetapkan kebijakan operasional dalam bentuk program-program yang selanjutnya ditetapkan dalam kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Perangkat Daerah dalam proses perencanaan, kajian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, koordinasi kebijakan pembangunan pertanian, serta peningkatan kemampuan aparat teknis dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur sehingga dapat memberikan arah pembangunan dalam periode 2023-2026.

Dalam menjabarkan kebijakan operasional yang telah ditetapkan serta untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang akan ditempuh, maka Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng mencanangkan program dalam kategori Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai

dengan Permendagri RI Nomor .90 tahun 2019 dan di sempurnakan dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah sebagai berikut:

6.1. Pertanian

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini dilaksanakan dalam upaya peningkatan kelompok tani yang menggunakan sarana Pertanian yang unggul, Maksud dan tujuan program ini akan dicapai melalui kegiatan:

- 1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
- 2) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota
- 3) Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini dimaksudkan untuk penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Maksud dan tujuan program dimaksud akan dicapai melalui kegiatan:

- 1) Pengembangan Prasarana Pertanian
- 2) Pembangunan Prasarana Pertanian

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit hewan sehingga Kabupaten Buleleng bebas dari penyakit strategis maupun yang bersifat ekonomis, sehingga mampu menyediakan bahan pangan asal ternak yang ASUH. Maksud dan tujuan dari program dimaksud akan dicapai melalui kegiatan:

- 1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini dimaksudkan untuk mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian, sehingga mampu menyediakan bahan pangan atau pertanian. Maksud dan tujuan dari program dimaksud akan dicapai melalui kegiatan:

- 1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

5. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini dilaksanakan dalam upaya memberdayakan penyuluh lapangan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, dalam arti bahwa pembina

teknis di lapangan sebagai ujung tombak pembangunan pertanian memiliki kemampuan yang sejalan dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi terapan yang sangat dibutuhkan oleh pelanggannya (pemangku kepentingan/petani). Maksud dan tujuan dari program dimaksud akan dicapai melalui kegiatan:

- 1) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

6.2 Program/Kegiatan Rutin

Disamping program/kegiatan diatas, beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng adalah program/kegiatan yang bersifat rutin, dimana program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk menunjang operasional SKPD dalam menjalankan Tupoksinya. Program/kegiatan dalam urusan wajib ini meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dimaksudkan untuk mengopersikan kebijakan-kebijakan dalam keperluan sehari-hari seperti surat menyurat, kelengkapan alat tulis menulis perkantoran, fotokopi dan penggandaan, dan lain-lain yang bersifat membantu keperluan operasional administrasi perkantoran. Kegiatan tersebut untuk menunjang pelayanan baik yang langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan yang memerlukan dukungan pemerintah khususnya di bidang pertanian. Upaya dimaksud dilaksanakan dengan kegiatan:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Perincian program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tahun 2023-2026 disajikan dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026
Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2023 (tahun Rencana) | | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | unit kerja OPD | lokasi | | | | |
|--|--|------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|--|---|---|------------------|-------------------|-------------------|---|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | | Kinerja | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | 18 | 19 | | | | | | |
| Terwujudnya tatakelola administrasi perkantoran yang berdaya saing | Meningkatnya tatakelola administrasi perkantoran | 3 | | URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 27 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Terwujudnya peningkatan tatakelola dan capaian kinerja perangkat daerah | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah % | 100 | 19,700,000,000.00 | 100 | 19,750,000,000.00 | 100 | 19,850,000,000.00 | 100 | 19,850,000,000.00 | 100 | 79,150,000,000.00 | Dinas Pertanian | Kab.Buleleng | | | | | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan terlaksanannya evaluasi kinerja Perangkat Daerah | 26 dokumen | 26 dokumen | 290,000,000.00 | 26 dokumen | 291,707,148.59 | 26 dokumen | 292,973,397.18 | 26 dokumen | 194,239,645.77 | 26 dokumen | 1,068,920,191.54 | | | | | | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 dokumen | 6 dokumen | 170,000,000.00 | 6 dokumen | 171,095,148.59 | 6 dokumen | 171,749,397.18 | 6 dokumen | 72,403,645.77 | 6 dokumen | 585,248,191.54 | | | | | |
| | | | | | | | - Jumlah dokumen renstra dan renja | 2 dokumen | 2 dokumen | | 2 dokumen | | 2 dokumen | - | 2 dokumen | - | 2 dokumen | - | | | | | | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18 Laporan | 18 dokumen | 120,000,000.00 | 18 dokumen | 120,612,000.00 | 18 dokumen | 121,224,000.00 | 18 dokumen | 121,836,000.00 | 18 dokumen | 483,672,000.00 | | | | | |
| | | | | | | | - Jumlah dokumen evaluasi kinerja | 1 dokumen | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | - | | | | | | |
| | | | | | | | - Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan | 20 kali | 20 kali | | 20 kali | | 20 kali | | 20 kali | | 20 kali | - | | | | | | |
| | | | | 3 | 27 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya tata kelola administrasi keuangan yang baik | Jumlah dokumen pelaporan keuangan | 135 dokumen | 135 dokumen | 17,485,559,100.00 | 135 dokumen | 17,574,735,451.41 | 135 dokumen | 17,663,911,802.82 | 135 dokumen | 17,753,088,154.23 | 135 dokumen | 70,477,294,508.46 | | | |
| | | | | 3 | 27 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 168 orang /bulan | 168 orang /bulan | 17,254,559,100.00 | 168 orang /bulan | 17,342,557,351 | 168 orang /bulan | 17,430,555,603 | 168 orang /bulan | 17,518,553,854 | 168 orang /bulan | 69,546,225,908.46 | | |
| | | | | 3 | 27 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 13 dokumen | 13 dokumen | 11,000,000.00 | 13 dokumen | 11,056,100 | 13 dokumen | 11,112,200 | 13 dokumen | 11,168,300 | 13 dokumen | 44,336,600.00 | | |
| | | | | 3 | 27 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 dokumen | 12 kali | 40,000,000.00 | 12 kali | 40,204,000 | 12 kali | 40,408,000 | 12 kali | 40,612,000 | 12 kali | 161,224,000.00 | | |
| | | | | 3 | 27 | 01 | 2.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 48 dokumen | 48 dokumen | 180,000,000.00 | 48 dokumen | 180,918,000 | 48 dokumen | 181,836,000 | 48 dokumen | 182,754,000 | 48 dokumen | 725,508,000.00 | | |
| | | | | | | | | - Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun | 1 dokumen | 1 dokumen | | 1 dokumen | - | 1 dokumen | - | 1 dokumen | - | 1 dokumen | - | | | | | |
| | | | | | | | | - Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran | 2 dokumen | 2 dokumen | | 2 dokumen | - | 2 dokumen | - | 2 dokumen | - | 2 dokumen | - | | | | | |
| | | | | 3 | 27 | 01 | 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah dokumen laporan pengelolaan aset BMD | 36 laporan | 36 laporan | 70,000,000.00 | 36 laporan | 70,357,000.00 | 36 laporan | 70,714,000.00 | 36 laporan | 71,071,000.00 | 36 laporan | 282,142,000.00 | | | |
| | | | | 3 | 27 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 36 laporan | 36 laporan | 70,000,000.00 | 36 laporan | 70,357,000.00 | 36 laporan | 70,714,000.00 | 36 laporan | 71,071,000.00 | 36 laporan | 282,142,000.00 | | |
| | | | | 3 | 27 | 01 | 2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlaah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah | 12 dokumen | 12 dokumen | 10,000,000.00 | 12 dokumen | 10,051,000.00 | 12 dokumen | 10,102,000.00 | 12 dokumen | 10,153,000.00 | 12 dokumen | 40,306,000.00 | | | |
| | | | | 3 | 27 | 01 | 2.04 | 07 | Pelaporan pengelolaan retribusi daerah | Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 dokumen | 12 dokumen | 10,000,000.00 | 12 dokumen | 10,051,000.00 | 12 dokumen | 10,102,000.00 | 12 dokumen | 10,153,000.00 | 12 dokumen | 40,306,000.00 | | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian | 13 dokumen | 13 dokumen | 370,000,000.00 | 13 dokumen | 371,887,000.00 | 13 dokumen | 373,774,000.00 | 13 dokumen | 375,661,000.00 | 13 dokumen | 1,491,322,000.00 | | | | | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 paket | 1 paket | 80,000,000.00 | 1 paket | 80,408,000.00 | 1 paket | 80,816,000.00 | 1 paket | 81,224,000.00 | 1 paket | 322,448,000.00 | | | | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.05 | 04 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengo | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 290,000,000.00 | 12 Dokumen | 291,479,000.00 | 12 Dokumen | 292,958,000.00 | 12 Dokumen | 294,437,000.00 | 12 Dokumen | 1,168,874,000.00 | | | | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya fasilitas kegiatan penunjang administrasi umum perangkat daerah | Jumlah fasilitas penunjang kegiatan administrasi umum perangkat daerah | 53 laporan | 53 laporan | 437,000,000.00 | 53 laporan | 439,228,700.00 | 53 laporan | 441,457,400.00 | 53 laporan | 443,686,100.00 | 53 laporan | 1,761,372,200.00 | | | | | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 paket | 5 paket | 25,000,000.00 | 5 paket | 25,127,500.00 | 5 paket | 25,255,000.00 | 5 paket | 25,382,500.00 | 5 paket | 100,765,000.00 | | | | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 45 paket | 45 paket | 100,000,000.00 | 45 paket | 100,510,000.00 | 45 paket | 101,020,000.00 | 45 paket | 101,530,000.00 | 45 paket | 403,060,000.00 | | | | |
| | | | | | | - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantoryang diadakan dalam kondisi baik | 3 jenis | 3 jenis | - | 3 jenis | - | 3 jenis | - | 3 jenis | - | 3 jenis | - | | | | | | | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 paket | 12 paket | 100,000,000.00 | 12 paket | 100,510,000.00 | 12 paket | 101,020,000.00 | 12 paket | 101,530,000.00 | 12 paket | 403,060,000.00 | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2023 (tahun Rencana) | | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | unit kerja OPD | lokasi | | |
|--------|---|------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | | | | Kinerja | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 4 dokumen | 4 dokumen | 12,000,000.00 | 4 dokumen | 12,061,200.00 | 4 dokumen | 12,122,400.00 | 4 dokumen | 12,183,600.00 | 4 dokumen | 48,367,200.00 | | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2 laporan | 2 laporan | 100,000,000.00 | 2 laporan | 100,510,000.00 | 2 laporan | 101,020,000.00 | 2 laporan | 101,530,000.00 | 2 laporan | 403,060,000.00 | | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 laporan | 50 laporan | 100,000,000.00 | 50 laporan | 100,510,000.00 | 50 laporan | 101,020,000.00 | 50 laporan | 101,530,000.00 | 50 laporan | 403,060,000.00 | | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya fasilitas kegiatan penunjang pengadaan BMD | Jumlah fasilitas penunjang kegiatan Penunjang Pengadaan BMD | 3 unit | 3 unit | 50,440,900.00 | 3 unit | 50,698,148.59 | 3 unit | 50,955,397.18 | 3 unit | 51,212,645.77 | 3 unit | 203,307,091.54 | | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 unit | 1 unit | 35,440,900.00 | 2 unit | 35,621,648.59 | 2 unit | 35,802,397.18 | 2 unit | 35,983,145.77 | 2 unit | 142,848,091.54 | | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 unit | 2 unit | 15,000,000.00 | 2 unit | 15,076,500.00 | 2 unit | 15,153,000.00 | 2 unit | 15,229,500.00 | 2 unit | 60,459,000.00 | | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya fasilitas kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah fasilitas penunjang kegiatan Penunjang urusan pemerintah daerah | 157 laporan | 157 laporan | 780,000,000.00 | 157 laporan | 783,978,000.00 | 157 laporan | 787,956,000.00 | 157 laporan | 791,934,000.00 | 157 laporan | 3,143,868,000.00 | | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 laporan | 12 laporan | 73,000,000.00 | 12 laporan | 73,372,300.00 | 12 laporan | 73,744,600.00 | 12 laporan | 74,116,900.00 | 12 laporan | 294,233,800.00 | | |
| | | | | | | | | | | 3000 surat | 3000 surat | | 3000 surat | | 3000 surat | | 3000 surat | | 3000 surat | | | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 35 laporan | 35 laporan | 250,000,000.00 | 35 laporan | 251,275,000.00 | 35 laporan | 252,550,000.00 | 35 laporan | 253,825,000.00 | 35 laporan | 1,007,650,000.00 | | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 laporan | 2 laporan | 257,000,000.00 | 2 laporan | 258,310,700.00 | 2 laporan | 259,621,400.00 | 2 laporan | 260,932,100.00 | 2 laporan | 1,035,864,200.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 96 laporan | 96 laporan | 200,000,000.00 | 96 laporan | 201,020,000.00 | 96 laporan | 202,040,000.00 | 96 laporan | 203,060,000.00 | 96 laporan | 806,120,000.00 | | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 53 laporan | 53 laporan | 207,000,000.00 | 53 laporan | 208,055,700.00 | 53 laporan | 209,111,400.00 | 53 laporan | 210,167,100.00 | 53 laporan | 834,334,200.00 | | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 50 unit | 50 unit | 132,000,000.00 | 50 unit | 132,673,200.00 | 50 unit | 133,346,400.00 | 50 unit | 134,019,600.00 | 50 unit | 532,039,200.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 unit | 1 unit | 50,000,000.00 | 1 unit | 50,255,000.00 | 1 unit | 50,510,000.00 | 1 unit | 50,765,000.00 | 1 unit | 201,530,000.00 | | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 unit | 2 unit | 25,000,000.00 | 2 unit | 25,127,500.00 | 2 unit | 25,255,000.00 | 2 unit | 25,382,500.00 | 2 unit | 100,765,000.00 | | |
| | Meningkatnya Produksi pertanian yang maju | 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Meningkatnya Nilai Produk Pertanian | Persentase Kelompok Tani yang menggunakan Sarana Pertanian yang Unggul % | 48.18 | 59.01 | 4,200,000,000.00 | 66.30 | 3,500,000,000.00 | 73.30 | 5,000,000,000.00 | 79.53 | 5,500,000,000.00 | 79.53 | 18,200,000,000.00 | Dinas Pertanian | Kab.Buleleng |
| | | 3 | 27 | 02 | 2.01 | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pertanian | 21 Laporan | 27 Laporan | 1,160,000,000.00 | 32 Laporan | 1,036,000,000.00 | 35 Laporan | 1,352,000,000.00 | 38 Laporan | 1,478,000,000.00 | 38 Laporan | 5,026,000,000.00 | | |
| | | 3 | 27 | 02 | 2.01 | 01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 21 Laporan | 27 Laporan | 760,000,000.00 | 32 Laporan | 736,000,000.00 | 35 Laporan | 912,000,000.00 | 38 Laporan | 998,000,000.00 | 38 Laporan | 3,406,000,000.00 | | |
| | | | | | | | | TP | Jumlah Penangkar benih yang berkompeten | 7 Kelompok | 8 Kelompok | | 9 Kelompok | | 10 Kelompok | | 11 Kelompok | | 11 Kelompok | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Sumber benih berkualitas | 1 Kelompok | 1 Kelompok | | 1 Kelompok | | 1 Kelompok | | 1 Kelompok | | 1 Kelompok | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Pestisida nabati | 1 jenis | 1 jenis | | 2 jenis | | 2 jenis | | 2 jenis | | 2 jenis | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah alat mesin pasca panen | 1 jenis | 2 jenis | | 3 jenis | | 3 jenis | 3 jenis | 3 jenis | 3 jenis | 3 jenis | | | |
| | | | | | | | | | jumlah jenis produk pertanian HASIL INOVASI | 0 jenis | 1 jenis | | 2 jenis | | 3 jenis | | 4 jenis | | 4 jenis | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Produk pertanian yang di pasarkan dengan online | 2 jenis produk | 3 jenis produk | | 3 jenis produk | | 3 jenis produk | | 3 jenis produk | | 3 jenis produk | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Produk pertanian yang di pasarkan dengan offline | 7 jenis produk | 8 jenis produk | | 9 jenis produk | | 10 jenis produk | | 11 jenis produk | | 11 jenis produk | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah pelaksanaan temu usaha pertanian | 1 kali | 2 kali | | 2 kali | | 2 kali | | 2 kali | | 2 kali | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2023 (tahun Rencana) | | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | unit kerja OPD | lokasi | | | | |
|--------|---------|------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---|------------------|---------------------|------------------|--|--|--|
| | | | | Kinerja | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp. | | | | | | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 27 | 02 | 2.01 | 02 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 2 Laporan | 6 Laporan | 400,000,000.00 | 8 Laporan | 300,000,000.00 | 8 Laporan | 440,000,000.00 | 10 Laporan | 480,000,000.00 | 10 Laporan | 1,620,000,000.00 | | | |
| | | | | | | | PSP | Jumlah alat mesin prapanen | 1 jenis | 3 jenis | | 4 jenis | | 4 jenis | | 5 jenis | | 5 jenis | | 5 jenis | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Pupuk/Pestisida nabati | 1 jenis | 3 jenis | | 4 jenis | | 4 jenis | | 5 jenis | | 5 jenis | | 5 jenis | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 27 | 02 | 2.02 | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota | Terlaksannya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme | Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme | 74 Dokumen | 89 Dokumen | 1,520,000,000.00 | 92 Dokumen | 1,472,000,000.00 | 96 Dokumen | 1,824,000,000.00 | 102 Dokumen | 2,046,000,000.00 | 102 Dokumen | 6,862,000,000.00 | | | |
| | | 3 | 27 | 02 | 2.02 | 02 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 74 Dokumen | 89 Dokumen | 760,000,000.00 | 92 Dokumen | 736,000,000.00 | 96 Dokumen | 912,000,000.00 | 102 Dokumen | 998,000,000.00 | 102 Dokumen | 3,406,000,000.00 | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penangkar benih yang berkompeten | 6 Kelompok | 7 Kelompok | | 8 Kelompok | | 9 Kelompok | | 10 Kelompok | - | 10 Kelompok | - | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Sumber benih berkualitas | 13 Kelompok | 14 Kelompok | | 15 Kelompok | | 16 Kelompok | | 17 Kelompok | - | 17 Kelompok | - | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Pestisida nabati | 1 jenis | 3 jenis | | 3 jenis | | 3 jenis | | 4 jenis | - | 4 jenis | - | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah alat mesin pasca panen | 3 jenis | 4 jenis | | 4 jenis | | 4 jenis | | 5 jenis | - | 5 jenis | - | | | |
| | | | | | | | | | jumlah jenis produk pertanian HASIL INOVASI | - | 1 jenis | | 1 jenis | | 1 jenis | | 1 jenis | - | 1 jenis | - | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah penerapan hasil riset di tingkat pengguna | - | 1 kelompok | | 1 kelompok | | 1 kelompok | | 1 kelompok | - | 1 kelompok | - | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Produk pertanian yang di pasarkan dengan online | 5 produk | 6 produk | | 6 produk | | 6 produk | | 7 produk | - | 7 produk | - | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Produk pertanian yang di pasarkan dengan offline | 44 produk | 45 produk | | 46 produk | | 47 produk | | 48 produk | - | 48 produk | - | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah pelaksanaan temu usaha pertanian | - | 2 kali | | 2 kali | | 3 kali | | 3 kali | - | 3 kali | - | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah MoU Produk Pertanian yang ditindaklanjuti | - | 4 kali | | 4 kali | | 4 kali | | 4 kali | - | 4 kali | - | | | |
| | | | | | | | | | - Jumlah SL GAP komoditas hortikultura | 2 kelompok | 2 kelompok | | 2 kelompok | | 2 kelompok | | 2 kelompok | - | 2 kelompok | - | | | |
| | | 3 | 27 | 02 | 2.02 | 03 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanam | 26 Dokumen | 33 Dokumen | 760,000,000.00 | 38 Dokumen | 736,000,000.00 | 41 Dokumen | 912,000,000.00 | 45 Dokumen | 1,048,000,000.00 | 45 Dokumen | 3,456,000,000.00 | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penangkar benih yang berkompeten | 2 Kelompok | 3 Kelompok | | 4 Kelompok | | 5 Kelompok | | 6 Kelompok | - | 6 Kelompok | - | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Sumber benih berkualitas | 1 Kelompok | 1 Kelompok | | 1 Kelompok | | 1 Kelompok | | 1 Kelompok | - | 1 Kelompok | - | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Pestisida nabati | 0 jenis | 1 jenis | | 1 jenis | | 2 jenis | | 2 jenis | - | 2 jenis | - | | | |
| | | | | | | | | | jumlah jenis produk pertanian HASIL INOVASI | 1 jenis | 2 jenis | | 3 jenis | | 3 jenis | | 3 jenis | - | 3 jenis | - | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah penerapan hasil riset di tingkat pengguna | - | 1 kelompok | | 1 kelompok | | 1 kelompok | | 1 kelompok | - | 1 kelompok | - | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Produk pertanian yang di pasarkan dengan online | 5 produk | 6 produk | | 6 produk | | 6 produk | | 6 produk | - | 6 produk | - | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Produk pertanian yang di pasarkan dengan offline | 6 produk | 7 produk | | 8 produk | | 9 produk | | 10 produk | - | 10 produk | - | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah pelaksanaan temu usaha pertanian | 1 kali | 1 kali | | 2 kali | | 2 kali | | 3 kali | - | 3 kali | - | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah MoU Produk Pertanian yang ditindaklanjuti | 1 kali | 1 kali | | 2 kali | | 2 kali | | 3 kali | - | 3 kali | - | | | |
| | | | | | | | | | - Jumlah penanggulangan bencana komoditas perkebunan | 9 kelompok | 10 kelompok | | 10 kelompok | | 10 kelompok | | 10 kelompok | - | 10 kelompok | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 27 | 02 | 2.03 | | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak | Jumlah Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak | 62 Laporan | 68 Laporan | 1,520,000,000.00 | 73 Laporan | 992,000,000.00 | 78 Laporan | 1,824,000,000.00 | 81 Laporan | 1,976,000,000.00 | 81 Laporan | 6,312,000,000.00 | | | |
| | | 3 | 27 | 02 | 2.03 | 01 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | 62 Laporan | 68 Laporan | 1,520,000,000.00 | 73 Laporan | 992,000,000.00 | 78 Laporan | 1,824,000,000.00 | 81 Laporan | 1,976,000,000.00 | 81 Laporan | 6,312,000,000.00 | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah benih ternak (straw) unggul | 16.000 benih ternak | 17.000 benih ternak | | 18.000 benih ternak | | 19.000 benih ternak | | 20.000 benih ternak | | 20.000 benih ternak | - | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah petugas IB yang berkompeten | 20 orang | 25 orang | | 30 orang | | 35 orang | | 38 orang | | 38 orang | - | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah pengelolaan pertanian dan peternakan sesuai aspek teknis | 9 unit/lokasi | 9 unit/lokasi | | 9 unit/lokasi | | 9 unit/lokasi | | 9 unit/lokasi | | 9 unit/lokasi | - | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2023 (tahun Rencana) | | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | unit kerja OPD | lokasi |
|--------|--|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|--|---|---|----------------|-------------|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---|------------------|-------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | | | Kinerja | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | | Jumlah sarpras pertanian dan peternakan | 9 unit | 9 unit | | 9 unit | | 9 unit | | 9 unit | | 9 unit | - | | | |
| | | | | | | Jumlah tempat pelayanan peternakan | 10 unit/lokasi | 10 unit/lokasi | | 10 unit/lokasi | | 10 unit/lokasi | | 10 unit/lokasi | | 10 unit/lokasi | - | | | |
| | | | | | | Jumlah alat dan mesin peternakan | 1 unit | 1 unit | | 1 unit | | 1 unit | | 1 unit | | 1 unit | - | | | |
| | | | | | | Jumlah jenis produk pertanian HASIL INOVASI | 1 jenis | 1 jenis | | 1 jenis | | 1 jenis | | 1 jenis | | 1 jenis | - | | | |
| | | | | | | Jumlah penerapan hasil riset di tingkat pengguna | - | 1 kelompok | | 1 kelompok | | 1 kelompok | | 1 kelompok | | 1 kelompok | - | | | |
| | | 3 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Produksi pertanian yang maju | 3 27 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Meningkatnya Penyediaan Prasarana Pertanian | Persentase Kelompok Tani yang menggunakan Prsarana Pertanian yang Unggul % | 48.18 | 59.01 | 900,000,000.00 | 66.30 | 1,400,000,000.00 | 73.30 | 3,500,000,000.00 | 79.53 | 4,000,000,000.00 | 79.53 | 9,800,000,000.00 | Dinas Pertanian | Kab.Buleleng |
| | | 3 27 03 2.01 | | | Pengembangan Prasarana Pertanian | Terlaksananya penyediaan prasarana pertanian | Jumlah Penyediaan Prasarana Pertanian | 41 laporan | 41 laporan | 335,000,000.00 | 41 laporan | 370,000,000.00 | 41 laporan | 675,000,000.00 | 41 laporan | 610,000,000.00 | 41 laporan | 1,990,000,000.00 | | |
| | | | 3 27 03 2.01 01 | | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150,000,000.00 | 1 Dokumen | 165,000,000.00 | 1 Dokumen | 380,000,000.00 | 1 Dokumen | 296,500,000.00 | 1 Dokumen | 991,500,000.00 | | |
| | | | | | | | Jumlah pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | 1 Paket | 1 Paket | | 1 Paket | | 1 Paket | | 1 Paket | | 1 Paket | | | |
| | | 3 27 03 2.01 03 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 40 Laporan | 40 Laporan | 185,000,000.00 | 40 Laporan | 205,000,000.00 | 40 Laporan | 295,000,000.00 | 40 Laporan | 313,500,000.00 | 40 Laporan | 998,500,000.00 | | |
| | | 3 27 03 2.02 | | | Pembangunan Prasarana pertanian | Terlaksananya pembangunan prasarana pertanian | Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian | 4 Unit | 4 Unit | 565,000,000.00 | 7 Unit | 1,030,000,000.00 | 20 Unit | 2,825,000,000.00 | 24 Unit | 3,390,000,000.00 | 40 Unit | 7,810,000,000.00 | | |
| | | 3 27 03 2.02 01 | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara | 1 Unit | 1 Unit | 145,000,000.00 | 2 Unit | 290,000,000.00 | 5 Unit | 725,000,000.00 | 6 Unit | 870,000,000.00 | 10 Unit | 2,030,000,000.00 | | |
| | | 3 27 03 2.02 02 | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian | Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | 1 Unit | 120,000,000.00 | 2 Unit | 240,000,000.00 | 5 Unit | 600,000,000.00 | 6 Unit | 720,000,000.00 | 10 Unit | 1,680,000,000.00 | | |
| | | 3 27 03 2.02 03 | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 unit | 1 unit | 200,000,000.00 | 2 Unit | 400,000,000.00 | 5 Unit | 1,000,000,000.00 | 6 Unit | 1,200,000,000.00 | 10 Unit | 2,800,000,000.00 | | |
| | | 3 27 03 2.02 09 | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | 1 Unit | 100,000,000.00 | 1 Unit | 100,000,000.00 | 5 Unit | 500,000,000.00 | 6 Unit | 600,000,000.00 | 10 Unit | 1,300,000,000.00 | | |
| | Terwujudnya Produksi Pertanian yang Modern | 3 27 04 | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Terkendalnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase Kelompok Tani / Ternak yang berbudidaya secara intensif % | 48.18 | 59.01 | 950,000,000.00 | 66.30 | 950,000,000.00 | 73.30 | 1,000,000,000.00 | 79.53 | 1,000,000,000.00 | 79.53 | 3,900,000,000.00 | Dinas Pertanian | Kab.Buleleng |
| | | 3 27 04 2.01 | | | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengendalian kesehatan hewan/penyakit hewan | Jumlah Pengendalian kesehatan hewan/penyakit hewan | 25 laporan | 25 laporan | 950,000,000.00 | 25 laporan | 950,000,000.00 | 25 laporan | 1,000,000,000.00 | 25 laporan | 1,000,000,000.00 | 25 laporan | 3,900,000,000.00 | | |
| | | 3 27 04 2.01 01 | | | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Terkendali dan Tertanggulangnya Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | 22 Laporan | 24 Laporan | 600,000,000.00 | 2 Laporan | 600,000,000.00 | 2 Laporan | 615,000,000.00 | 2 Laporan | 615,000,000.00 | 2 Laporan | 2,430,000,000.00 | | |
| | | | | | | | Jumlah tempat pelayanan peternakan | 9 tempat | 10 tempat | | 10 tempat | - | 10 tempat | - | 10 tempat | - | 10 tempat | - | | |
| | | | | | | | Jumlah obat/vaksin peternakan (dosis) | 1.500 dosis | 2.000 dosis | | 2.500 dosis | - | 2.750 dosis | - | 3.000 dosis | - | 3.000 dosis | - | | |
| | | | | | | | - Jumlah penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis | 1 paket | 2 paket | | 2 paket | - | 2 paket | - | 2 paket | - | 2 paket | - | | |
| | | 3 27 04 2.04 01 | | | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | Terlaksananya Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | 3 Laporan | 5 Laporan | 350,000,000.00 | 5 Laporan | 350,000,000.00 | 6 Laporan | 385,000,000.00 | 7 Laporan | 385,000,000.00 | 7 Laporan | 1,470,000,000.00 | | |
| | | | | | | | Jumlah alat dan mesin peternakan | 1 jenis | 2 jenis | | 2 jenis | | 2 jenis | | 3 jenis | - | 3 jenis | - | | |
| | | | | | | | Jumlah sertifikat NKV | 2 Unit | 3 Unit | | 3 Unit | | 4 Unit | | 4 Unit | | 4 Unit | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2023 (tahun Rencana) | | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | unit kerja OPD | lokasi | |
|--------|---|------|----|----|-------------------------------|--|---|---|---|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---|-------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | | | | | Kinerja | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | Terwujudnya Produksi Pertanian yang Modern | 3 | 27 | 05 | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Terwujudnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian % | 100 | 100 | 427,000,000.00 | 100 | 450,000,000.00 | 100 | 550,000,000.00 | 100 | 650,000,000.00 | 100 | 2,077,000,000.00 | Dinas Pertanian | Kab.Buleleng |
| | | 3 | 27 | 05 | 2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Jumlah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | 50 Ha | 55 Ha | 427,000,000.00 | 60 Ha | 450,000,000.00 | 65 Ha | 550,000,000.00 | 70 Ha | 650,000,000.00 | 70 Ha | 2,077,000,000.00 | | |
| | HORTI | 3 | 27 | 05 | 2.01 | 01 | Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 50 Ha | 55 Ha | 105,000,000.00 | 60 Ha | 110,500,000.00 | 65 Ha | 135,325,000.00 | 70 Ha | 160,150,000.00 | 70 Ha | 510,975,000.00 | | |
| | | | | | | | | Jumlah MoU Produk Pertanian yang ditindaklanjuti | 3 Kelompok | 4 Kelompok | | 5 Kelompok | - | 6 Kelompok | - | 7 Kelompok | - | 7 Kelompok | - | | |
| | | | | | | | | - Jumlah penanggulangan bencana komoditas hortikultura | 3 Kelompok | 4 Kelompok | | 4 Kelompok | - | 5 Kelompok | - | 6 Kelompok | - | 6 Kelompok | - | | |
| | | | | | | | | - Jumlah SL-PHT komoditas Hortikultura | 5 kelompok | 6 kelompok | | 6 kelompok | | 7 kelompok | | 7 kelompok | | 7 kelompok | | | |
| | TP | 3 | 27 | 05 | 2.01 | 02 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani | 50 Ha | 55 Ha | 105,000,000.00 | 60 Ha | 110,500,000.00 | 65 Ha | 135,325,000.00 | 70 Ha | 160,150,000.00 | 70 Ha | 510,975,000.00 | | |
| | | | | | | | | - jumlah pelatihan kewaspadaan OPT tanaman pertanian | 2 Kelompok | 3 Kelompok | | 4 Kelompok | - | 4 Kelompok | - | 5 Kelompok | - | 5 Kelompok | - | | |
| | PKH | 3 | 27 | 05 | 2.01 | 04 | Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis | Tertanggulangnya Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis | 9 Laporan | 9 Laporan | 105,000,000.00 | 9 Laporan | 110,500,000.00 | 10 Laporan | 135,325,000.00 | 10 Laporan | 160,150,000.00 | 10 Laporan | 510,975,000.00 | | |
| | PSP | 3 | 27 | 05 | 2.01 | 05 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | Tertanggulangnya Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | 9 Laporan | 9 Laporan | 112,000,000.00 | 9 Laporan | 118,500,000.00 | 10 Laporan | 144,025,000.00 | 10 Laporan | 169,550,000.00 | 10 Laporan | 544,075,000.00 | | |
| | | | | | | | | - Jumlah fasilitasi pembiayaan pertanian pada kelompok tani | 9 kali | 9 kali | | 9 kali | - | 10 kali | - | 10 kali | - | 10 kali | - | | |
| | Terwujudnya Produksi Pertanian yang Mandiri | 3 | 27 | 07 | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peyuluh dan Petugas Teknis dan kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Persentase peningkatan pengetahuan penyuluh dan petugas teknis % | 50 | 50.50 | 1,673,000,000.00 | 60 | 1,800,000,000.00 | 70 | 1,900,000,000.00 | 80 | 1,950,000,000.00 | 80 | 7,323,000,000.00 | Dinas Pertanian | Kab.Buleleng |
| | | 3 | 27 | 07 | 2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Persentase kelembagaan yang melakukan intensifikasi pengelolaan pertanian dan peternakan % | | | 1,673,000,000.00 | | 1,800,000,000.00 | | 1,900,000,000.00 | | 1,950,000,000.00 | | 7,323,000,000.00 | | |
| | | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Unit | 1 Unit | 1,306,115,441.00 | 1 Unit | 1,406,726,985.10 | 1 Unit | 1,437,338,529.20 | 1 Unit | 1,450,338,529.00 | 1 Unit | 5,600,519,484.30 | | |
| | | | | | | | | Jumlah SDA Pertanian berpotensi | 5 kelompok | 6 kelompok | | 7 kelompok | | 8 kelompok | | 9 kelompok | | 9 kelompok | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Potensi wilayah | 9 Lokasi | 9 Lokasi | | 9 Lokasi | - | 9 Lokasi | - | 9 Lokasi | - | 9 Lokasi | - | | |
| | | | | | | | | Jumlah Penyuluh bersertifikat | 47 orang | 48 orang | | 49 orang | - | 50 orang | - | 51 orang | - | 51 orang | - | | |
| | | | | | | | | jumlah Penyuluh swadaya | 6 kelompok | 8 kelompok | | 10 kelompok | - | 12 kelompok | - | 14 kelompok | - | 14 kelompok | - | | |
| | | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 9 Unit | 9 Unit | 290,000,000.00 | 9 Unit | 289,000,000.00 | 9 Unit | 316,400,000.00 | 9 Unit | 338,711,544.30 | 9 Unit | 1,234,111,544.30 | | |
| | | | | | | | | Jumlah petani/Poktan/gapoktan dgn skor kemampuan Klas Madya | 70 kelompok | 70 kelompok | | 70 kelompok | - | 70 kelompok | - | 70 kelompok | - | 70 kelompok | - | | |
| | | | | | | | | Jumlah POKTAN dengan biaya swadaya | 5 kelompok | 6 kelompok | | 7 kelompok | - | 8 kelompok | - | 9 kelompok | - | 9 kelompok | - | | |
| | | | | | | | | Jumlah POKTAN dengan biaya lembaga keuangan | 9 kelompok | 18 kelompok | | 27 kelompok | | 36 kelompok | | 45 kelompok | | 45 kelompok | | | |
| | | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 03 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 1 Unit | 1 Unit | 30,000,000.00 | 2 Unit | 52,700,000.00 | 3 Unit | 90,000,000.00 | 4 Unit | 100,000,000.00 | 4 Unit | 272,700,000.00 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2023 (tahun Rencana) | | | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | unit kerja OPD | lokasi | | | | | | | | |
|--------|---------|---------------------|----|----|------|----|---|---|---|------------|--|---|------------|---------------|------------|---------------|------------|---|------------|----------------|----|----|--|----------------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|--------------------|--|--|
| | | | | | | | | Kinerja | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Target | | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 05 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah fasilitas pendukung smartfarming | 1 kelompok | 2 kelompok | | 3 kelompok | - | 4 kelompok | - | 5 kelompok | - | 5 kelompok | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi | | 2 Unit | 2 Unit | 46,884,559.00 | 2 Unit | 51,573,014.90 | 2 Unit | 56,261,470.80 | 2 Unit | 60,949,926.70 | 2 Unit | 215,668,971.40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah penerapan hasil riset di tingkat pengguna | | 1 kelompok | 1 kelompok | | 1 kelompok | - | 1 kelompok | - | 1 kelompok | - | 1 kelompok | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | | 1 kelompok | 2 kelompok | | 2 kelompok | | 2 kelompok | - | 2 kelompok | - | 2 kelompok | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 27,850,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27,850,000,000.00 | | 31,800,000,000.00 | | 32,950,000,000.00 | | 120,450,000,000.00 | | |
| | | JUMLAH PROGRAM | | | | | 6 PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JUMLAH KEGIATAN | | | | | 17 KEGIATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JUMLAH SUB KEGIATAN | | | | | 47 SUB KEGIATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Buleleng



Ir. I Made Sumiarta,
NIP. 19650215 199703 1 003

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Pada umumnya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang lebih informatif mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dilakukan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan sub sektor pertanian di Kabupaten Buleleng.

Prestasi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng empat tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan ukuran kinerja dimaksud harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Perangkat Daerah itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026.

Indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban, namun juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan

menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dengan dokumen RPD Kabupaten Buleleng 2023-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan daerah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng harus diarahkan untuk mencapai target kinerja yang telah dicantumkan dalam RPD.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng yang mendukung dalam RPD maka secara rinci indikator kinerja untuk empat tahun kedepan 2023–2026 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 7.1 berikut ini:

| Tabel 7.1 | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|--|
| Indikator Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD | | | | | | | |
| No | Indikator Tujuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Persentase peningkatan produksi Pertanian (%) | 48.18 | 59.01 | 66.30 | 73.07 | 79.53 | 79.53 |
| 2 | Persentase Kelembagaan Petani dan pelaku usaha yang Mandiri (%) | 2.85 | 2.97 | 3.08 | 3.19 | 3.30 | 3.30 |
| 3 | Persentase Produksi Pertanian dengan teknologi % | 3 | 3.10 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.13 |

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 - 2026

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Meningkatnya Produksi Pertanian yang Maju | Persentase peningkatan produksi pertanian (%) | 48.18 | 59.01 | 66.30 | 73.07 | 79.53 | Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng |
| 2 | Terwujudnya Produksi Pertanian yang Mandiri | Persentase kelembagaan petani dan pelaku usaha yang mandiri (%) | 2.85 | 2.97 | 3.08 | 3.19 | 3.30 | |
| 3 | Terwujudnya Produksi dan Pemasaran Pertanian yang Modern | Persentase Produksi Pertanian dengan teknologi % | 3.00 | 3.10 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | |

INDIKATOR KINERJA SASARAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 - 2026

| NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|------------------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Meningkatnya Produksi Pertanian yang Maju | Jumlah benih ternak (straw) unggul (ekor) | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 19,000 | 20,000 | Bidang Peternakan dan Keswan |
| | | Jumlah petugas IB yang berkompeten (orang) | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | Bidang Peternakan dan Keswan |
| | | Jumlah Penangkar Benih Berkompeten (Kelompok) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bidang Hortikultura |
| | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Bidang Tanaman Pangan |
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bidang Perkebunan |
| | | Jumlah Sumber Benih Berkualitas (Kelompok) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bidang Tanaman Pangan |
| | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Bidang Hortikultura |
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bidang Perkebunan |
| | | Jumlah pestisida nabati (Jenis) | - | 1 | 2 | 2 | 2 | Bidang Tanaman Pangan |
| | | | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | Bidang Hortikultura |
| | | | - | 1 | 1 | 2 | 2 | Bidang Perkebunan |
| | | Jumlah obat/vaksin peternakan (dosis) | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 2,750 | 3,000 | Bidang Peternakan dan Keswan |
| | | Jumlah tempat pelayanan peternakan (lokasi) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | Bidang Peternakan dan Keswan |
| | | Jumlah alat dan mesin peternakan(paket) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bidang Peternakan dan Keswan |
| | | Jumlah sumber air pertanian(paket) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bidang PSP |
| | | Jumlah jalan pertanian yang memadai (paket) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bidang PSP |
| | | Jumlah alat mesin prapanen (paket) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Bidang PSP |
| | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Bidang Tanaman Pangan |
| | | Jumlah alat mesin pasca panen (paket) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | Bidang Hortikultura |
| | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Bidang Perkebunan |
| 2 | Terwujudnya Produksi Pertanian yang Mandiri | Jumlah SDA Pertanian berpotensi (kelompok) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Bidang Penyuluhan |
| | | Jumlah Potensi wilayah (lokasi) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Bidang Penyuluhan |
| | | Jumlah Penyuluh bersertifikat (orang) | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | Bidang Penyuluhan |
| | | jumlah Penyuluh swadaya (orang/kelompok) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | Bidang Penyuluhan |
| | | Jumlah petani/Poktan/gapoktan dgn skor kemampuan Klas Madya (kelompok) | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | Bidang Penyuluhan |
| | | Jumlah pengelolaan pertanian dan peternakan sesuai aspek teknis(unit) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Bidang Peternakan dan Keswan |
| | | Jumlah sarpras pertanian dan peternakan (unit) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Bidang Peternakan dan Keswan |
| | | Jumlah fasilitas pendukung smartfarming (Kelompok) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bidang Penyuluhan |
| | | Jumlah POKTAN dengan biaya swadaya (Kelompok) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Bidang Penyuluhan |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| | | jumlah POKTAN yang dibiayai lembaga keuangan (kelompok) | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | Bidang PSP |
| 3 | Terwujudnya Produksi dan Pemasaran Pertanian yang Modern | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Bidang Tanaman Pangan |
| | | jumlah jenis produk pertanian HASIL INOVASI (jenis) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bidang Hortikultura |
| | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Bidang Perkebunan |
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bidang Peternakan dan Keswan |
| | | Jumlah penerapan hasil riset di tingkat pengguna (kelompok) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bidang Hortikultura |
| | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bidang Peternakan dan Keswan |
| | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bidang Perkebunan |
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bidangb penyuluhan |
| | | Jumlah hasil produksi pertanian ; | 308,289.50 | 317,846.47 | 317,877.30 | 317,908.13 | 317,938.96 | jumlah Produksi |
| | | Produksi padi (Ton) | 106,660.50 | 109,966.98 | 109,977.64 | 109,988.31 | 109,998.97 | Bidang Tanaman Pangan |
| | | Produksi palawija (Ton) | 37,033.00 | 38,181.02 | 38,184.73 | 38,188.43 | 38,192.13 | Bidang Tanaman Pangan |
| | | Produkai Hortikultura (Ton) | 137,855.00 | 142,128.51 | 142,142.29 | 142,156.08 | 142,169.86 | Bidang Hortikultura |
| | | Produkai Perkebunan (Ton) | 19,000.00 | 19,589.00 | 19,590.90 | 19,592.80 | 19,594.70 | Bidang Perkebunan |
| | | Produkai Daging (Ton) | 7,741.00 | 7,980.97 | 7,981.75 | 7,982.52 | 7,983.29 | Bidang Peternakan dan Keswan |
| | | | | | | | | |
| | | Populasi sapi (Ekor) | 149,305 | 149,610 | 149,915 | 150,220 | 150,525 | Bidang Peternakan dan Keswan |
| | | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Bidang Tanaman Pangan |
| | | Jumlah produk pertanian yang dipasarkan secara online (jenis) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Bidang Perkebunan |
| | | | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | Bidang Hortikultura |
| | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | Bidang Peternakan dan Keswan |
| | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Bidang Tanaman Pangan |
| | | Jumlah produk pertanian yang dipasarkan secara offline (jenis) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bidang Perkebunan |
| | | | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Bidang Hortikultura |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bidang Peternakan dan Keswan |
| | | Jumlah pelaksanaan temu usaha pertanian (mitra usaha) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Bidang Tanaman Pangan |
| | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Bidang Perkebunan |
| | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Bidang Hortikultura |
| | | Jumlah MoU Produk Pertanian yang ditindaklanjuti (mitra usaha) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Bidang Perkebunan |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bidang Hortikultura |
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bidang Peternakan dan Keswan |
| 4 | Meningkatnya tata kelola adminitrasi perkantoran | Persentase capaian fisik dan keuangan (persen) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Sekretariat |

BAB VIII. PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026 ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), penyusunan program kerja bagi pejabat eselon III dan IV, Jabatan Fungsional (Substansi) bersama staf pelaksana serta merupakan dasar dalam evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan maupun empat tahun.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng disusun sebagai langkah awal dalam mendukung program pembangunan pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026. Pernyataan visi, misi, penetapan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diwujudkan dalam program dan kegiatan diarahkan untuk mendukung hal tersebut.

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

- Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan komitmen bersama seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, sehingga seluruh aparatur dimaksud berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng ini dengan penuh tanggung jawab dan sebaik-baiknya guna mewujudkan visi, misi, tujuan serta sasaran yang hendak diraih;
- Rencana Strategis (RENSTRA) wajib dijadikan pedoman dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng serta pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*);
- Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng periode tahun 2023-2026. Namun demikian, hal ini tidak berarti menghilangkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap perkembangan peluang dan tantangan. Penyesuaian-penyesuaian tetap perlu dilakukan mengingat dinamika kondisi lapangan maupun kemampuan keuangan daerah;
- Apabila penyesuaian terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng cukup penting dan mendesak maka aplikasi manajemen adaptif (*adaptive management*) wajib dilakukan dengan cara merevisi dokumen ini sehingga Renstra tetap informatif dan aktual.

Mengingat bahwa keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas perencanaannya, maka kemampuan dan kerja keras para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menerjemahkan rencana ke dalam pelaksanaannya menjadi faktor kunci sukses (*key success factor*) yang sangat penting.